



*doc. kecejaan
Praktikum Ceb ..
28/03/2023 /
07 / Suharma*

**LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM
PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL**

**PEMBIMBING:
Suharma, Ph.D**

Oleh:
**ANDIRA PERMATASARI
NRP. 20.03.120**

**POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL
BANDUNG
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM
PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN SOSIAL
Nama Mahasiswa : Andira Permatasari
NRP : 20.03.120
Program : Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
Program Sarjana Terapan

Pembimbing:

Suharma, Ph.D



Mengetahui:

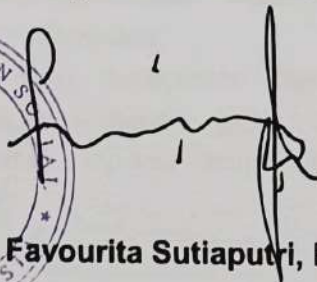
Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

Program Sarjana Terapan

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung,



Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D



KATA PENGANTAR

Puji syukur praktikan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga praktikan dapat menyelesaikan Laporan Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Laporan ini disusun untuk memenuhi Praktikum Laboratorium yang diadakan oleh Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

Pada penyusunan laporan, praktikan banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, sehingga praktikan ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Marjuki, M.Sc selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
2. Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D selaku Kepala Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.
3. Dra. Atirista Nainggolan, MP selaku Kepala Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.
4. Suharna, Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan, ilmu, serta motivasi kepada penulisselama proses praktikum berlangsung.
5. Keluarga dan sahabat yang selalu memberikan motivasi, dan doa kepada penulis setiap saat.
6. Rekan-rekan anggota kelompok 1 Praktikum Laboratorium, Arnold Gebze, Fitri Fadillah, Imelda Endang K., Giovano Okki Alfredo K., Ghaita Putri A., Dewa Ayu Agung T.B., dan Teuku Mohammad R.S yang telah bekerja sama dengan baik selama pelaksanaan kegiatan Praktikum Laboratorium; serta
7. Semua pihak yang telah membantu dalam kegiatan Praktikum Laboratorium yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Praktikan menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Praktikan sangat menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan laporan menjadi lebih baik, sehingga dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Bandung, April 2023

Praktikan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Manfaat Praktikum.....	1
C. Waktu dan Lokasi Praktikum	3
D. Proses Praktikum.....	3
BAB II PRAKTIKUM LABORATORIUM.....	11
A. Analis Jaminan Sosial.....	11
B. Analis Sumber Dana Bantuan Sosial.....	31
C. Analis Pemberdayaan Sosial.....	50
D. Analis Penataan Lingkungan Sosial.....	68
E. Analis Penanggulangan Bencana.....	87
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Rekomendasi.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Sistem Partisipan Profil Jaminan Sosial.....	23
Tabel 2.2. Rencana Anggaran Biaya Profil Jaminan Sosial.....	25
Tabel 2.3. Alat yang Dibutuhkan Profil Jaminan Sosial.....	26
Tabel 2.4. Analisis Kelayakan Program Jaminan Sosial.....	27
Tabel 2.5. Jadwal Kegiatan Program Jaminan Sosial.....	29
Tabel 2.6. Sistem Partisipan Profil Sumber Dana Bantuan Sosial.....	42
Tabel 2.7. RAB Profil Sumber Dana Bantuan Sosial.....	44
Tabel 2.8. Alat yang Dibutuhkan Profil Sumber Dana Bantuan Sosial.....	45
Tabel 2.9. Analisis Kelayakan Program Sumber Dana Bantuan Sosial.....	46
Tabel 2.10. Jadwal Kegiatan Program Sumber Dana Bantuan Sosial.....	48
Tabel 2.11. Sistem Partisipan Profil Pemberdayaan Sosial.....	60
Tabel 2.12. Rencana Anggaran Biaya Profil Pemberdayaan Sosial.....	62
Tabel 2.13. Alat yang Dibutuhkan Profil Pemberdayaan Sosial.....	63
Tabel 2.14. Analisis Kelayakan Program Pemberdayaan Sosial.....	64
Tabel 2.15. Jadwal Kegiatan Program Pemberdayaan Sosial.....	66
Tabel 2.16. Sistem Partisipan Profil Penataan Lingkungan Sosial.....	79
Tabel 2.17. RAB Profil Penataan Lingkungan Sosial.....	81
Tabel 2.18. Alat yang Dibutuhkan Profil Penataan Lingkungan Sosial.....	82
Tabel 2.19. Analisis Kelayakan Program Penataan Lingkungan Sosial.....	83
Tabel 2.20. Jadwal Kegiatan Program Penataan Lingkungan Sosial.....	85
Tabel 2.21. Sistem Partisipan Profil Penanggulangan Bencana.....	98
Tabel 2.22. RAB Profil Penanggulangan Bencana.....	100
Tabel 2.23. Alat yang Dibutuhkan Profil Penanggulangan Bencana.....	101
Tabel 2.24. Analisis Kelayakan Program Penanggulangan Bencana.....	102
Tabel 2.25. Jadwal Kegiatan Program Penanggulangan Bencana.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Pohon Masalah Profil Jaminan Sosial.....	17
Gambar 2.2. Pohon Masalah Profil Sumber Dana Bantuan Sosial.....	37
Gambar 2.3. Pohon Masalah Profil Pemberdayaan Sosial.....	55
Gambar 2.4. Pohon Masalah Profil Penataan Lingkungan Sosial.....	73
Gambar 2.5. Pohon Masalah Profil Penanggulangan Bencana.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pendidikan di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran dalam kelas (*classroom teaching*), tetapi juga melalui praktikum laboratorium (*laboratory practicum*) indoor dan outdoor. Kegiatan praktikum menjadi wahana bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan-keterampilan dasar dan keterampilan-keterampilan khusus dalam proses intervensi pekerjaan sosial. Dengan demikian mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam praktik aras mikro, meso, dan makro, baik dalam bekerja dengan individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi sosial. Praktikum Laboratorium disamping dilaksanakan dalam ruangan laboratorium, juga mahasiswa diberikan kesempatan melakukan aktivitas di masyarakat dan/atau organisasi sosial untuk memahami fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.

Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial menjadi bagian penting dalam membentuk profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yaitu sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana. Melalui praktikum laboratorium, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan keterampilan praktik intervensi pekerjaan sosial mulai proses awal hingga pengakhiran melalui aktivitas di dalam laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Demikian pula dalam praktikum ini dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan keterampilan dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial. Kegiatan praktikum laboratorium berfokus pada penguasaan keterampilan dasar dan keterampilan proses intervensi pekerjaan sosial dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat dan organisasi sosial.

B. Tujuan dan Manfaat Praktikum Laboratorium

1. Tujuan Praktikum Laboratorium

Praktikum laboratorium bertujuan agar mahasiswa memiliki :

- a. Sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas Berdasarkan agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, perbedaan agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinil orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

- b. Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
- c. Kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- d. Kemampuan untuk mempraktikkan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- e. Memiliki keterampilan dalam melakukan proses intervensi pekerjaan sosial meliputi tahapan :
 - 1) Pendekatan Awal
 - 2) Asesmen
 - 3) Perencanaan Intervensi

2. Manfaat Praktikum Laboratorium

a. Bagi Mahasiswa :

- 1) Terbentuknya sikap mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasar agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinal orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan.
- 2) Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- 3) Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- 4) Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mempraktikkan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- 5) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya secara nyata dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- 6) Mahasiswa memiliki keterampilan praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial yang meliputi tahapan :
 - a) Pendekatan awal
 - b) Asesmen
 - c) Rencana Intervensi

b. Bagi Lembaga

- 1) Meningkatnya kualitas kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
- 2) Sebagai alat evaluasi untuk perbaikan kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

C. Waktu dan Lokasi Praktikum

Lokasi praktikum di Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat. Waktu pelaksanaan Praktikum Laboratorium sesuai dengan tahapan proses terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu :

1. Pra Lapangan
 - a. Pembekalan : 25 Januari – 3 Februari 2023
 - b. Pelepasan Praktikan : 3 Februari 2023
2. Lapangan : 6 Februari - 15 April 2023
3. Pasca Lapangan
 - a. Bimbingan penulisan laporan : 16 - 26 April 2023
 - b. Pendaftaran ujian : 27 – 29 April 2023
 - c. Ujian Lisan Praktikum : 2-3 Mei 2023
 - d. Perbaikan dan penyerahan Laporan : 3 – 10 Mei 2023

D. Proses Praktikum

Proses praktikum laboratorium dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhiran.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap sebelum turun ke lapangan yang dilaksanakan untuk menyiapkan praktikan dan dosen pembimbing praktikum dalam memahami kegiatan praktikum laboratorium pada setiap profilnya, antara lain sebagai berikut:

a. Pembekalan umum

Pembekalan umum dilaksanakan dengan pemberian materi tentang perlindungan dan jaminan sosial oleh narasumber yang terdiri dari:

- 1) Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI
- 2) Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI

b. Bimbingan pra lapangan oleh dosen pembimbing praktikum

- 1) Review tentang materi pembekalan umum dan penugasan melalui Google Classroom
- 2) Bimbingan teori/konsep dan keterampilan yang akan diterapkan
- 3) Melakukan Praktik, demonstrasi, *role playing* tentang kegiatan dan teknologi Perlindungan dan pemberdayaan sosial dengan menggunakan data sekunder, dalam hal :
 - a) Mengenal populasi kelompok sasaran (*population target group*) dan lingkungan sosialnya.
 - b) Mengidentifikasi dan memahami program-program : Sistem Jaminan Sosial, Sumber Dana Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penataan Lingkungan Sosial, Penanggulangan Bencana.

- c) Mempelajari isu-isu masalah perlindungan dan pemberdayaan sosial yang terkait dengan 5 (lima) profil Prodi Lindayasos.
 - d) Mengidentifikasi kebijakan dan program/kegiatan penanganan masalah Perlindungan dan Pemberdayaan sosial sesuai dengan 5 (lima) profil Prodi Lindayasos.
- 4) Membuat matriks rencana kerja dan desain teknologi yang sesuai dengan kegiatan praktikum laboratorium
- c. Serah terima praktikan dari Prodi kepada Dosen Pembimbing Praktikum**

Serah terima ini, dilaksanakan secara luring di kampus Politeknik Kesejahteraan Sosial dilakukan oleh Kaprodi Lindayasos kepada dosen poltekesos Bandung yang ditunjuk sebagai dosen pembimbing praktikum.

2. Tahap Lapangan

Tahap lapangan dilaksanakan dalam lima sesi sesuai profil lulusan Prodi Lindayasos yaitu praktik sebagai Analisis Jaminan Sosial, Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analisis Pemberdayaan Sosial, Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analisis Penanggulangan Bencana. Dimana setiap sesi dilaksanakan selama 14 hari kalender, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Peningkatan kompetensi analisis jaminan sosial

- 1) Peningkatan kompetensi analisis jaminan sosial oleh praktisi/pakar

Praktikan mendapatkan pembekalan materi oleh Ibu Gayatri Waditra Nirwesti, ME. pada tanggal 2 Februari 2023. Materi yang dibahas di pembekalan ini adalah pengelolaan sistem jaminan sosial berdasarkan pengalaman dari praktisi, yang meliputi :

- a) Kebijakan dan struktur jaminan sosial
 - b) Tantangan program jaminan sosial di Indonesia: pekerja informal di Indonesia
 - c) Potensi kontribusi lulusan jaminan sosial
- 2) Peningkatan Kompetensi Analisis Jaminan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analisis Jaminan Sosial, sebagai berikut:
- a) Pengetahuan
 - (1) Mengetahui konsep teoritis kebutuhan dasar manusia
 - (2) Memahami konsep masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial
 - (3) Mengetahui konsep perlindungan dan jaminan sosial
 - (4) Mengetahui konsep standar praktik pekerjaan sosial
 - b) Keterampilan
 - (1) Mampu melaksanakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
 - (2) Mampu menganalisis dan menyusun program perlindungan dan jaminan sosial untuk mencegah dan

menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal

- (3) Mampu menganalisis dan menyusun program bantuan sosial
 - (4) Mampu menganalisis dan menyusun program advokasi sosial Mampu menganalisis dan menyusun program pemberian akses bantuan hukum.
- 3) Praktik analisis jaminan sosial

Setelah mendapatkan pembekalan secara lengkap terhadap profil analisis jaminan sosial, praktikan selanjutnya melaksanakan praktikum lapangan di Kelurahan Babakan Sari dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah dalam pelaksanaan jaminan sosial
- b) Melakukan asesmen, dengan menggunakan data primer
- c) Menyusun rencana intervensi sesuai dengan kasus/permasalahan yang dipilih oleh praktikan
- d) Menyusun laporan praktik analisis jaminan sosial

b. Peningkatan Kompetensi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

- 1) Peningkatan Kompetensi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh Praktisi/Pakar

Praktikan mendapatkan pembekalan materi oleh Bapak Tonton Heryanto pada tanggal 22 Februari 2023. Materi yang dibahas di pembekalan ini adalah pengelolaan sumber dana bantuan sosial berdasarkan pengalam dari praktisi, yang meliputi :

- a) Berbagai isu dalam implementasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial
 - b) Cara manajemen sumber dana bantuan sosial
 - c) Komponen dalam membangun jaringan
 - d) Pemetaan dan penetapan mitra untuk kebutuhan organisasi
 - e) Pengorganisasian , monitoring, dan evaluasi
 - f) Tips penggalangan dana bantuan sosial
 - g) Budgeting: komponen dan tahapan
- 2) Peningkatan Kompetensi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos yang ditugaskan, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, sebagai berikut:
- a) Pengetahuan
 - (1) Menguasai konsep bantuan sosial
 - (2) Menguasai konsep sumber dana bantuan sosial
 - (3) Menguasai konsep penggalangan dana dan prinsip-prinsip penggalangan sumber dana bantuan sosial

- (4) Menguasai konsep perencanaan dalam penggalangan sumber dana bantuan sosial
- (5) Menguasai konsep pelaksanaan dan kebijakan penggalangan sumber dana bantuan sosial
- (6) Menguasai konsep monitoring dan evaluasi dalam penggalangan sumber dana bantuan sosial

b) Keterampilan

- (1) Mampu menganalisis dan menyusun program perencanaan dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial
- (2) Mampu dalam menganalisis dan menyusun program pelaksanaan dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial
- (3) Mampu menganalisis dan menyusun program monitoring dan evaluasi dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial
- (4) Mampu menganalisis dan menyusun sistem pelaporan dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial
- (5) Mampu menganalisis dan menyusun sistem informasi dan komunikasi dalam penggalangan dana pengelolaan dana bantuan sosial

3) Praktik Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

Setelah mendapatkan pembekalan secara lengkap terhadap profil sumber dana bantuan sosial, praktikan selanjutnya melaksanakan praktikum lapangan di Kelurahan Babakan Sari dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah dalam pengelolaan sumber dana bantuan sosial
- b) Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data primer
- c) Menyusun Rencana Intervensi
- d) Menyusun laporan praktik analisis sumber dana bantuan sosial

c. Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial

1) Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial oleh praktisi/pakar

Praktikan mendapatkan pembekalan materi oleh Bapak Samsul Maarif pada tanggal 8 Maret 2023. Materi yang dibahas di pembekalan ini adalah pemberdayaan sosial berdasarkan pengalaman dari praktisi, yang meliputi :

- a) Pengertian dan inti dari pemberdayaan
- b) Pendekatan pemberdayaan masyarakat
- c) Aktor-aktor dalam program pemberdayaan
- d) Tahapan dan proses pemberdayaan
- e) Permasalahan dan solusi dalam pemberdayaan
- f) Peran dan keterampilan dalam pemberdayaan

2) Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos yang ditugaskan, dengan materi mengacu pada kompetensi profil pemberdayaan sosial, sebagai berikut:

a) Pengetahuan

- (1) Menguasai Konsep kebutuhan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam pemberdayaan sosial
- (2) Menguasai Konsep dan teknologi pemberdayaan sosial
- (3) Menguasai Konsep sumber daya penyelenggaraan sosial dalam pemberdayaan sosial
- (4) Menguasai Konsep supervisi dalam program pemberdayaan sosial
- (5) Menguasai Konsep pendampingan sosial dan penguatan kelembagaan sosial dalam pemberdayaan sosial
- (6) Menguasai Konsep keserasian sosial dan pemasaran hasil usaha dalam pemberdayaan sosial

b) Keterampilan

- (1) Mampu mengidentifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan dalam pemberdayaan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat
- (2) Mampu menganalisis dan menyusun program penumbuhan kesadaran dan pemberian motivasi dalam pemberdayaan sosial
- (3) Mampu menganalisis dan menyusun program pemberian keterampilan dalam pemberdayaan sosial
- (4) Mampu menganalisis dan menyusun program penguatan kelembagaan dalam masyarakat dalam pemberdayaan sosial
- (5) Mampu melaksanakan program pendampingan sosial untuk pemberdayaan sosial
- (6) Mampu menganalisis dan menyusun program kemitraan dan penggalangan dana untuk pemberdayaan sosial
- (7) Mampu melaksanakan pemberian akses terhadap stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha
- (8) Mampu melaksanakan peningkatan akses pemasaran hasil usaha
- (9) Mampu melaksanakan supervisi dan advokasi sosial dalam pemberdayaan sosial
- (10) Mampu menganalisis dan menyusun program keserasian sosial dan bimbingan lanjut dalam pemberdayaan sosial

3) Praktik Analisis Pemberdayaan Sosial

Setelah mendapatkan pembekalan secara lengkap terhadap profil Analisis Pemberdayaan Sosial, praktikan selanjutnya

melaksanakan praktikum lapangan di Kelurahan Babakan Sari dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah dalam pelaksanaan Pemberdayaan Sosial
- b) Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data primer
- c) Menyusun Rencana Intervensi
- d) Menyusun laporan praktik Analisis Pemberdayaan Sosial

d. Peningkatan Kompetensi Analisis Penataan Lingkungan Sosial

- 1) Peningkatan Kompetensi Analisis Penataan Lingkungan Sosial oleh Praktisi/Pakar

Praktikan mendapatkan pembekalan materi oleh Bapak Ade Reno, AKS, MSW pada tanggal 24 Maret 2023. Materi yang dibahas di pembekalan ini adalah penataan lingkungan sosial berdasarkan pengalaman dari praktisi, yang meliputi :

- a) Gambaran umum penataan lingkungan sosial
 - b) Kompetensi yang dibutuhkan untuk praktek penataan lingkungan sosial
 - c) Peran dan keterampilan dalam pemberdayaan
- 2) Peningkatan Kompetensi Analisis penataan lingkungan sosial oleh dosen Prodi Lindayasos, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial, sebagai berikut:

a) Pengetahuan:

- (1) Menguasai Konsep ekologi manusia dalam lingkungan sosial
- (2) Menguasai Konsep krisis lingkungan, konflik sosial, dan urbanisasi
- (3) Menguasai Konsep degradasi lingkungan dan bencana alam
- (4) Menguasai Konsep adaptasi ekologi manusia
- (5) Menguasai Konsep interaksi sosial-ekologi dalam suatu sistem sosial komunitas dan ekosistem
- (6) Menguasai Konsep kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam
- (7) Menguasai Konsep praktik pekerjaan sosial dalam penataan lingkungan sosial

b) Keterampilan

- (1) Mampu menganalisis hubungan permasalahan lingkungan dengan munculnya masalah sosial
- (2) Mampu menganalisis dan menyusun program pengembangan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam
- (3) Mampu menganalisis dan menyusun program penataan lingkungan sosial dalam peningkatan keberfungsian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat

- 3) Praktik Analisis Penataan Lingkungan Sosial

Setelah mendapatkan pembekalan secara lengkap terhadap profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial, praktikan selanjutnya melaksanakan praktikum lapangan di Kelurahan Babakan Sari dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/masalah-masalah dalam penataan lingkungan sosial
- b) Assesmen dengan menggunakan data primer
- c) Menyusun Rencana Intervensi
- d) Menyusun laporan praktik Analisis Penataan Lingkungan Sosial

e. Peningkatan Kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana

1) Peningkatan Kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana oleh Praktisi/Pakar

Praktikan mendapatkan pembekalan materi oleh Bapak Mohd Robi Amri pada tanggal 5 April 2023. Materi yang dibahas di pembekalan ini adalah penanggulangan bencana berdasarkan pengalam dari praktisi, yang meliputi :

- a) Gambaran umum kondisi kebencanaan di Indonesia
- b) Gambaran peran masyarakat dan para pihak dalam upaya antisipasi bencana
- c) Gambaran umum kegiatan dan tantangan penanggulangan bencana
- d) Kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa
- e) Memberikan gambaran peran dalam upaya penanggulangan bencana

2) Peningkatan Kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana oleh dosen yang ditugaskan, dengan materi mengacu pada kompetensi Profil Analisis Penanggulangan Bencana, sebagai berikut:

- a) Pengetahuan:
 - (1) Menguasai Konsep bencana alam dan non alam serta jenis-jenisnya
 - (2) Konsep masalah bencana dan sistem penanggulangan bencana
 - (3) Menguasai Konsep mitigasi bencana, dan pengurangan risiko bencana.
 - (4) Menguasai Konsep perlindungan korban bencana pada saat status darurat bencana
 - (5) Menguasai Konsep standar minimum pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana Menguasai Konsep praktik pekerjaan sosial dalam penataan lingkungan sosial
- b) Keterampilan
 - (1) Mampu melaksanakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk pengurangan risiko bencana
 - (2) Mampu menganalisis dan menyusun program perlindungan korban pada saat status darurat bencana

- (3) Mampu menganalisis pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan pengungsi
 - (4) Mampu menganalisis dan menyusun program pemberdayaan korban bencana pasca bencana
 - (5) Mampu menganalisis dan menyusun program pengembangan masyarakat resilien terhadap bencana
- 3) **Praktik Analisis Penanggulangan Bencana**

Setelah mendapatkan pembekalan secara lengkap terhadap profil Analisis Penanggulangan Bencana, praktikan selanjutnya melaksanakan praktikum lapangan di Kelurahan Babakan Sari dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/ masalah-masalah dalam penanggulangan bencana
- b) Assesmen dengan menggunakan data primer
- c) Menyusun Rencana Intervensi
- d) Menyusun laporan praktik Analisis penanggulangan bencana

3. Tahap Pasca Lapangan

- a. Finalisasi penyusunan laporan akhir praktikum
- b. Ujian lisan praktikum
- c. Perbaikan dan penyerahan laporan

E. Sistematika Laporan

Laporan akhir mencantumkan keseluruhan hasil kegiatan praktikum. Laporan akhir kegiatan praktikum disusun secara individu berdasarkan sistematika laporan sebagai berikut

1. **BAB I** : Pendahuluan, pada bab ini terdiri atas latar belakang, tujuan dan manfaat praktikum, waktu dan lokasi praktikum, proses praktikum, dan sistematika laporan.
2. **BAB II** : Praktikum Laboratorium, memuat tentang analisis profil lulusan yaitu Analisis Jaminan Sosial; Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial; Analisis Pemberdayaan Sosial; Analisis Penataan Lingkungan Sosial; Analisis Penanggulangan Bencana. Setiap profil analisis memuat gambaran umum masalah; tinjauan konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial yang dipilih; asesmen; dan rencana intervensi. Rencana intervensi memuat latar belakang; tujuan umum dan khusus; bentuk kegiatan dan program; sistem partisipan; metode dan Teknik; rencana anggaran biaya dan alat yang dibutuhkan; analisis kelayakan program; jadwal dan langkah-langkah.
3. **BAB III** : Kesimpulan dan Rekomendasi memuat kesimpulan dan rekomendasi untuk Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial serta Politeknik Kesejahteraan Sosial
4. Daftar Pustaka
5. Lampiran

BAB II

PRAKTIKUM LABORATORIUM

A. Profil Analisis Jaminan Sosial

1. Gambaran Umum Masalah

Dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”, kemudian Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dari kedua dasar hukum yang telah disebutkan, dapat dilihat bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kehidupan warga negaranya. Jaminan sosial adalah bentuk tanggung jawab negara yang berupa perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Badan yang bertugas mengatur penyelenggaraan program jaminan sosial adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari SJSN yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan yang bersifat wajib berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Kemudian telah diamanatkan pada Pasal 6 ayat 1 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan yang berbunyi Setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dan wajib membayar iuran dalam program Jaminan Kesehatan. Artinya jaminan kesehatan ini sifatnya wajib untuk setiap warga negara, dimana dengan adanya jaminan kesehatan diharapkan seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan di manapun tanpa adanya perbedaan terhadap pemeriksaan maupun obat-obatan yang dibutuhkan.

Pada 1 Januari 2019 semua warga negara Indonesia harus sudah mendaftar BPJS tanpa kecuali, apabila tidak mendaftar maka akan dikenakan sanksi yaitu tidak dapat mengakses pelayanan publik. Kemudian ketika warga masyarakat telah menjadi peserta BPJS pembayaran premi tidak boleh menunggak. Apabila peserta menunggak pembayaran maka status kartu BPJS akan dihentikan kepesertaannya. Penghentian ini bersifat sementara hingga peserta melunasi iuran yang tertunggak. Namun pada kenyataannya sanksi ini tidak dihiraukan oleh masyarakat karena masih ditemukan warga

masyarakat yang menunggak pembayaran premi bahkan dalam kurun waktu yang lama.

2. Tinjauan Konsep

a. Perlindungan Sosial

Menurut International Labour Organization (ILO) perlindungan sosial merupakan bagian dari kebijakan sosial yang dirancang untuk menjamin kondisi keamanan pendapatan serta akses dalam pelayanan sosial bagi semua orang, dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang memiliki kerentanan, serta melindungi dan memberdayakan masyarakat dalam semua siklus kehidupan. (International Labour Organization, 2012)

Asian Development Bank (ADB) menjelaskan bahwa perlindungan sosial pada dasarnya merupakan sekumpulan kebijakan dan program yang dirancang untuk menurunkan kemiskinan dan kerentanan melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri mereka dari bencana dan kehilangan pendapatan. Perlindungan sosial merupakan sarana penting untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan yang dihadapi oleh kelompok miskin. ADB membagi perlindungan sosial kedalam lima elemen, yaitu: 1) Pasar tenaga kerja; 2) Asuransi sosial; 3) Bantuan sosial; 4) Skema mikro dan area-based untuk perlindungan bagi komunitas setempat; dan 5) Perlindungan anak (Bappenas, 2014).

Menurut UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Perlindungan sosial disini ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial dilaksanakan melalui: 1) bantuan sosial; 2) advokasi sosial; dan/atau 3) bantuan hukum.

b. Jaminan Sosial

ILO (*International Labour Organization*) yang merupakan salah satu dari Badan PBB, memberikan pengertian jaminan sosial secara luas yaitu *Social Security* pada prinsipnya adalah sistem perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk warganya, melalui berbagai usaha dalam menghadapi resiko-resiko ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya atau sangat berkurangnya penghasilan (Husni, 2005).

Menurut UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Jenis program jaminan sosial meliputi: 1) jaminan kesehatan; 2) jaminan kecelakaan kerja; 3) jaminan hari tua; 4) jaminan pensiun; dan e. jaminan kematian.

c. Sistem Jaminan Sosial Nasional

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

SJSN pada dasarnya merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian atas perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program SJSN diharapkan setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak yang sewaktu-waktu dapat hilang atau berkurang antara lain karena berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), habis masa kerja (pensiun) maupun karena memasuki usia lanjut.

d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Menurut UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dijelaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. (Pasal 3 UU No 24 Tahun 2011).

Berdasarkan UU No 24 Tahun 2011 BPJS terbagi menjadi dua yaitu BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, keduanya bertanggung jawab langsung kepada presiden.

e. Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan menurut Peraturan BPJS Kesehatan No 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan, adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Peserta Jaminan Kesehatan meliputi PBI Jaminan Kesehatan dan Bukan PBI Jaminan Kesehatan yang terdiri atas Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, Pekerja Bukan

Penerima Upah dan anggota keluarganya, serta Bukan Pekerja dan anggota keluarganya.

f. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia terutama untuk Pegawai Negeri Sipil dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Dengan perkataan lain BPJS Kesehatan merupakan badan hukum nirlaba yang bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai Badan hukum nirlaba maka BPJS Kesehatan adalah perusahaan yang tidak mencari keuntungan. BPJS Kesehatan merupakan bagian dari sistem jaminan nasional. (Mariyam, 2018)

g. Manfaat BPJS Kesehatan

Peserta BPJS yang telah mendaftar dan membayar iuran berhak mendapatkan manfaat pelayanan jaminan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2012 tentang Jaminan Kesehatan dan Perpres nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, berupa pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Manfaat BPJS kesehatan terdiri atas manfaat medis dan manfaat non medis. Manfaat medis adalah pelayanan kesehatan medis di fasilitas kesehatan baik berupa pelayanan laboratorium, penunjang diagnostik, tindakan medis, tindakan operasi, dan termasuk pelayanan obat. Manfaat non medis meliputi manfaat akomodasi, dan ambulans. Manfaat akomodasi dibedakan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan peserta. Manfaat akomodasi atau kelas perawatan yang ditanggung dalam BPJS Kesehatan antara lain kelas III, II, dan kelas I dan dibedakan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan peserta

h. Universal Health Coverage

Universal Health Coverage menurut Mundiharno (2012), dapat diartikan sebagai cakupan menyeluruh. Istilah universal coverage berasal dari WHO (World Health Organization), lebih tepatnya *universal health coverage*. menjelaskan lebih jauh lagi mengenai tiga dimensi universal health coverage yakni bahwa:

1) Dimensi cakupan kepesertaan

Dari dimensi ini universal coverage dapat diartikan sebagai “kepesertaan menyeluruh”, dalam arti semua penduduk dicakup menjadi peserta jaminan kesehatan. Dengan menjadi peserta jaminan kesehatan diharapkan mereka memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan. Namun tidak semua penduduk yang telah menjadi peserta jaminan kesehatan dapat serta merta mengakses pelayanan

kesehatan. Jika di daerah tempat penduduk tinggal tidak ada fasilitas kesehatan, penduduk akan tetap sulit menjangkau pelayanan kesehatan.

2) Akses yang merata

Universal health coverage adalah akses yang merata bagi semua penduduk dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Secara implisit pengertian ini mengandung implikasi perlu tersedianya fasilitas dan tenaga kesehatan agar penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan benar-benar dapat memperoleh pelayanan kesehatan.

3) Pembiayaan yang ringan

Universal health coverage juga berarti bahwa proporsi biaya yang dikeluarkan secara langsung oleh masyarakat (*out of pocket payment*) makin kecil sehingga tidak mengganggu keuangan peserta (*financial catastrophic*) yang menyebabkan peserta menjadi miskin.

3. Tinjauan Kritis

Perlindungan sosial adalah kebijakan sebagai upaya untuk mencegah dan mengentaskan dari kerentanan sosial. Perlindungan sosial terbagi menjadi lima elemen pelaksanaan yaitu pasar tenaga kerja, asuransi sosial, bantuan sosial, skema mikro berbasis komunitas, serta perlindungan anak. Di Indonesia perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan bantuan hukum. Pada prinsipnya jaminan sosial adalah sistem perlindungan yang ditujukan kepada masyarakat dengan berbagai upaya menghadapi risiko sosial. Jaminan sosial sendiri adalah skema untuk menjamin kehidupan rakyat agar dapat berlangsung dengan layak. Sistem jaminan sosial adalah suatu tata cara penyelenggaraan jaminan sosial yang tujuannya untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar setiap pesertanya. Di Indonesia yang menyelenggarakan program jaminan sosial adalah BPJS dimana badan tersebut nantinya bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Jaminan kesehatan adalah perlindungan kesehatan yang dijamin setelah menjadi kepesertaan dan membayarkan iuran. Penyelenggara dari program jaminan kesehatan adalah BPJS Kesehatan. Peserta yang telah membayar iuran akan mendapatkan manfaat berupa pelayanan medis di fasilitas kesehatan serta akomodasi dan ambulans. Saat ini BPJS Kesehatan sedang mengupayakan pelayanan yang menyeluruh (UHC). UHC ini memiliki tiga dimensi yaitu cakupan kepesertaan, akses yang merata, dan pembiayaan yang ringan.

4. Asesmen

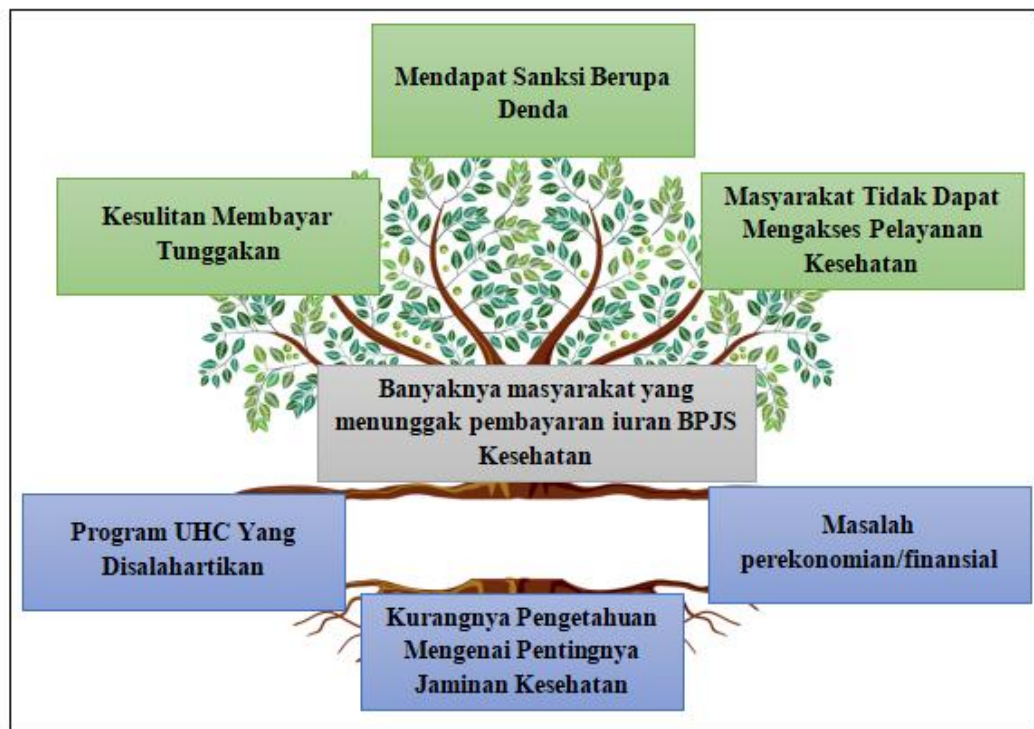
a. Identifikasi Masalah

Jaminan Kesehatan merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah setiap bulan secara teratur untuk program jaminan kesehatan. Kepesertaan mandiri yang terus mengalami peningkatan bertolak belakang dengan keteraturannya dalam membayar iuran JKN. Padahal, total pengeluaran BPJS Kesehatan untuk membiayai peserta yang sakit, beberapa kali lipat lebih besar dari angka pemasukan yang diterima dari premi peserta mandiri.

Sejak awal adanya BPJS jumlah peserta yang terdaftar dalam program ini terus meningkat. Tahun 2017, jumlah peserta telah mencapai 187,98 juta jiwa dengan persentase 72,97% dari jumlah penduduk Indonesia. Pada tahun pertama BPJS sudah mengalami defisit, tercermin dari jumlah beban yang lebih tinggi dibandingkan iuran (Agustio, 2018). Komponen terpenting untuk memudahkan pemanfaatan pelayanan kesehatan, yaitu kepatuhan dalam membayar iuran JKN bagi peserta mandiri. Pembayaran iuran setiap bulannya maksimal tanggal 10. Peserta yang terlambat dalam melakukan pembayaran status kepesertaannya akan diberhentikan sementara dan akan didenda sebesar 2,5% dari biaya pelayanan setiap bulan yang tertunggak.

Dari hasil wawancara dan observasi di Kelurahan Babakan Sari ditemukan bahwa terdapat beberapa permasalahan terkait pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Permasalahan ini menjadi sangat penting karena memberikan dampak yang serius bagi warga masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut baik dari yang berasal dari dalam diri (internal) maupun dari luar (eksternal).

Praktikan disini melakukan analisis masalah BPJS Kesehatan di Kelurahan Babakan Sari melalui pohon masalah. Pohon masalah merupakan suatu teknik untuk menggambarkan rangkaian hubungan sebab akibat serta beberapa faktor yang saling terkait. Pohon masalah biasanya digunakan pada tahap perencanaan. Berikut hasil analisis pohon sebab akibat masalah pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang terdapat di Kelurahan Babakan Sari.



Gambar 2.1. Pohon Masalah Profil Analisis Jaminan Sosial

1) Penyebab Masalah

- a) Kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya BPJS Kesehatan

Minimnya pengetahuan warga masyarakat terkait urgensi BPJS Kesehatan mengakibatkan mereka beranggapan bahwa menjadi peserta BPJS Kesehatan belum menjadi sebuah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Warga masyarakat disini menilai bahwa iuran yang dibayarkan tiap bulannya tidak dirasakan secara langsung kebermanfaatannya, hal ini dikarenakan mereka tidak memahami prinsip kegotong-royongan dari BPJS Kesehatan.

- b) Program UHC Yang Disalah Artikan oleh Masyarakat

Program UHC disini meng-*cover* dan memberikan kepastian kepada masyarakat dimana ketika mereka sakit maka akan langsung mendapat pelayanan kesehatan dengan jaminan pembiayaan. Kebijakan pelayanan UHC cukup mudah yaitu hanya dengan melapor pada fasilitas pelayanan kesehatan dimana nantinya diteruskan ke Dinas Sosial setempat untuk input data dan diaktifkan kepesertaan JKN-KISnya dengan segera, maksimal 48 jam.

Dengan adanya program UHC, warga masyarakat peserta BPJS Kesehatan Mandiri beranggapan bahwa

tidak perlu membayarkan premi sehingga mengalami penunggakan dan ketika mereka ingin mengakses pelayanan kesehatan hanya perlu mengurus administrasi yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan UHC saja. Memang implementasi pelayanan UHC untuk masyarakat BPJS Kesehatan Mandiri yang mengalami tunggakan hingga kepesertaannya non aktif tetap dilayani meskipun terdapat tunggakan, namun yang perlu digaris bawahi disini adalah tunggakan tetap ada dan harus tetap dibayarkan. Kemudian apabila mereka ingin mengalihkan menjadi peserta yang iurannya dibayarkan Pemerintah, kartu dapat segera diaktifkan, namun apabila masih memiliki tunggakan pembayaran tetap harus dibayar terlebih dahulu.

c) Masalah perekonomian/finansial

Adanya wabah COVID-19 berimbas kepada kelangsungan hidup warga masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, dimana sebagian warga masyarakat harus kehilangan pekerjaannya karena di PHK dari tempat kerjanya. Hal ini mengakibatkan mereka yang sebelumnya sebagai pekerja penerima upah mendapat jaminan kesehatan dari tempatnya bekerja, saat ini tidak lagi memiliki jaminan kesehatan. Selain itu dengan adanya PHK ini membuat pekerja yang sebelumnya harus membayar iuran dari anggota keluarganya mengalami kesulitan dalam pembayaran premi BPJS Kesehatan.

2) Dampak Masalah

a) Masyarakat Tidak Dapat Mengakses Pelayanan Kesehatan

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya jaminan kesehatan membuat mereka tidak tergabung dalam kepesertaan BPJS Kesehatan, hal ini mengakibatkan warga masyarakat akan sulit mengakses pelayanan kesehatan karena saat ini kepesertaan jaminan kesehatan sifatnya wajib untuk mendapatkan pelayanan dari fasilitas kesehatan. Pembayaran premi yang mengalami tunggakan juga akan menjadi kendala ketika masyarakat mengakses pelayanan kesehatan karena dinonaktifkannya kartu sehingga tidak dapat digunakan sampai mereka membayar tunggakannya.

b) Mendapat Sanksi Berupa Denda

Ketika warga masyarakat telah tergabung dalam kepesertaan BPJS Mandiri dan pernah mendapatkan pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan, namun kemudian mengalami penunggakan pembayaran maka ia akan dikenakan denda. Denda ini akan terus berjalan dan semakin bertambah hingga peserta tersebut

membayarkan tagihan berikut dengan dendanya. Denda dari tunggakan ini dapat menyentuh nominal hingga Rp 30 juta jika tidak segera dibayarkan.

c) Kesulitan Membayar Tunggakan

Akibat dari masyarakat yang enggan membayar premi di tiap bulannya membuat tunggakan yang tidak segera dibayarkan akan bertambah setiap bulannya dan bertumpuk hingga mencapai nominal yang besar. Pada akhirnya jika terjadi tunggakan pembayaran hingga berbulan-bulan atau bahkan tahunan, ditambah lagi apabila ia mendapatkan denda, maka akan membuat masyarakat semakin sulit melunasi tunggakan yang ada untuk dapat menggunakan kembali kartu dalam mengakses pelayanan kesehatan.

3) Fokus Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan BPJS Kesehatan di Kelurahan Babakan Sari, diperoleh fokus masalah yang sesuai dengan profil analisis jaminan sosial yaitu mengenai banyaknya masyarakat yang menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Fokus masalah ini diangkat sebagai topik penelitian karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia bahwa sifatnya wajib bagi tiap peserta untuk membayarkan iuran BPJS Kesehatan agar mendapatkan jaminan kesehatan.

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan prioritas masalah yang ada di Kelurahan Babakan Sari dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan, dapat diidentifikasi adanya kebutuhan warga masyarakat yaitu perihal pemahaman mengenai pentingnya jaminan kesehatan serta apa saja hak yang dapat diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Masyarakat juga memerlukan akses ke sumber informasi yang tepat dan terpercaya mengenai BPJS Kesehatan agar tidak terjadi *miscommunication* sehingga mempermudah dalam menerima pelayanan kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka masyarakat membutuhkan sosialisasi dan advokasi sosial.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sistem sumber yang dimiliki Kelurahan Babakan Sari dan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan yaitu antara lain:

1) Pengurus wilayah setempat

Pengurus wilayah memiliki tugas yaitu memberikan pelayanan masyarakat, memaksimalkan peran serta masyarakat, menjadi sarana penghubung antara masyarakat dengan pemerintah tingkat atas. Dengan adanya pengurus

wilayah setempat pada program ini nantinya akan berperan mendukung pelaksanaan program yang ada dengan mendorong masyarakat untuk andil dan berperan aktif serta sebagai pengawas dari jalannya program.

2) Dinas Sosial Kota Bandung

Dinas Sosial memiliki hubungan yang erat dan berpengaruh besar dengan program BPJS Kesehatan. Hal tersebut berhubungan dengan tugas pokok Dinas Sosial yaitu, melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, indentifikasi dan penguatan kapasitas, serta pemberdayaan sosial.

3) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

PKK adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang mampu menggerakkan partisipasi warga masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. PKK sebagai gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Adanya kader PKK di Kelurahan Babakan Sari dapat berperan pada pelaksanaan program yang berhubungan dengan BPJS Kesehatan karena disini mereka berperan sebagai wadah yang menampung aspirasi warga masyarakat dan mitra pemerintah kelurahan dalam mewujudkan kebutuhan masyarakat.

4) Penyuluh sosial masyarakat seperti Kader JKN

Kader JKN merupakan wujud partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dan turut membantu program pemerintah. Mereka langsung direkrut oleh BPJS Kesehatan dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan. Adanya kader JKN di Kelurahan Babakan Sari dapat berperan dalam memberi sosialisasi, edukasi, pendaftaran peserta, serta pengingat dan pengumpul dana iuran dari peserta BPJS Kesehatan.

5) Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

LINMAS adalah adalah satuan perlindungan yang bertugas untuk ikut serta memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta membantu kegiatan sosial masyarakat. Adanya LINMAS di Kelurahan Babakan Sari dapat berperan sebagai tim keamanan pada program yang bertugas menjaga kegiatan agar tetap kondusif sesuai dengan tujuan awal.

5. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Tujuan sistem kesehatan adalah peningkatan status kesehatan, perlindungan risiko terhadap biaya kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) dan kepuasan publik. Pentingnya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi penduduk Indonesia adalah adanya kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan (*sustainability*) dan dapat dilayani di seluruh wilayah Indonesia (portabilitas). Jaminan kesehatan memberikan pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap peserta yang telah membayar iurannya. Selain itu juga manfaat yang diperoleh yaitu peserta tidak perlu khawatir akan risiko kesehatan yang mungkin akan terjadi nantinya.

Berdasarkan hasil asesmen ditemukan bahwa ada 2000 peserta yang menunggak pembayaran pada bulan April tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya pengetahuan mengenai pentingnya BPJS Kesehatan karena keterbatasan informasi, kurangnya kesadaran untuk menunaikan kewajiban sebagai peserta BPJS Kesehatan, serta faktor finansial karena PHK pada masa pandemi COVID-19. Permasalahan menunggaknya pembayaran iuran BPJS Kesehatan ini menyebabkan jalannya program JKN di Kelurahan Babakan Sari menjadi terhambat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka praktikan merencanakan program Edukasi mengenai hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan serta Advokasi Sosial bagi masyarakat yang masuk pada golongan tidak mampu, dimana diharapkan program ini dapat membantu menangani permasalahan yang berfokus pada banyaknya peserta BPJS yang menunggak pembayaran iuran di Kelurahan Babakan Sari. Program dirancang dengan memanfaatkan potensi dan sumber yang tersedia di Kelurahan Babakan Sari sehingga kebutuhan terkait informasi dan akses pelayanan dapat terpenuhi.

b. Tujuan Umum dan Khusus

1) Tujuan Umum

Tujuan dari program yang direncanakan ini adalah untuk peningkatan kapasitas warga masyarakat dalam hal pemahaman mengenai pentingnya jaminan kesehatan serta hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Selain itu juga mengadvokasi agar warga masyarakat peserta BPJS Kesehatan Mandiri yang benar-benar tidak mampu dapat berubah ke JKN-PBI sehingga tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.

2) Tujuan Khusus

Tujuan dari program ini secara spesifik dijabarkan yaitu sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pemahaman warga masyarakat mengenai pentingnya BPJS Kesehatan
- b) Menurunnya angka peserta yang menunggak pembayaran di Kelurahan Babakan Sari
- c) Mendorong peningkatan kemampuan pemerintah dalam memperbaharui dan validasi data peserta BPJS Mandiri yang benar-benar tidak mampu membayar iuran.

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Program yang dirancang untuk mengatasi masalah yang terjadi adalah **“Sosialisasi dan Advokasi Sosial Mengenai BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracandong”**

Bentuk kegiatan dari program ini sendiri yaitu

- 1) Edukasi mengenai pentingnya BPJS Kesehatan serta hak dan kewajiban sebagai peserta BPJS Kesehatan
- 2) Advokasi sosial kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu untuk dapat berubah ke JKN-PBI

d. Sistem Partisipan

Pihak-pihak yang akan berpartisipasi dalam pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Sistem Partisipan Jaminan Sosial

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	<i>Inisiator System</i> (pemrakarsa/ yang memiliki ide untuk membuat suatu program)	Pekerja Sosial
2.	<i>Change Agent System</i> (orang atau lembaga yang mengkoordinasikan usaha perubahan)	1. Pekerja Sosial 2. Pengurus wilayah setempat 3. BPJS Kesehatan Kota Bandung 4. Dinas Sosial Kota Bandung
3.	<i>Client System</i> (orang/lembaga yang menerima pengubahan perilaku/menerima tujuan program)	Masyarakat yang bermasalah dengan pembayaran iuran BPJS Kesehatan
4.	<i>Support System</i> (orang/lembaga yang membantu terlaksananya program)	1. Pengurus wilayah setempat 2. BPJS Kesehatan Kota Bandung 3. Dinas Sosial Kota Bandung 4. PKK 5. Kader JKN 6. LINMAS
5.	<i>Controlling System</i> (orang/lembaga yang mengontrol dan mengawasi jalannya program)	1. Pengurus wilayah setempat 2. BPJS Kesehatan Kota Bandung 3. Dinas Sosial Kota Bandung
6.	<i>Implementing System I</i> (orang/lembaga yang melaksanakan program)	1. Pekerja Sosial 2. Pengurus wilayah setempat 3. BPJS Kesehatan Kota Bandung 4. Dinas Sosial Kota Bandung 5. PKK 6. Kader JKN 7. LINMAS 8. Warga Masyarakat Kelurahan Babakan Sari
7.	<i>Target System</i> (orang/lembaga yang menjadi sasaran program)	Seluruh Masyarakat Kelurahan Babakan Sari
8.	<i>Action System</i> (orang/ lembaga yang bersama pekerja sosial berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas dan mencapai tujuan usaha perubahan)	1. Pengurus wilayah setempat 2. BPJS Kesehatan Kota Bandung 3. Dinas Sosial Kota Bandung 4. PKK 5. Kader JKN 6. LINMAS

e. Metode dan Teknik

1) Metode

Metode yang digunakan untuk mengatasi masalah banyaknya warga yang menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan di Kelurahan Babakan Sari yaitu dengan menggunakan metode Community Organization dan Community Development (CO/CD). Pemilihan metode CO/CD dilakukan karena target sarannya adalah organisasi sosial yang melakukan pelayanan dalam setting masyarakat di tingkat kelurahan.

Model yang diterapkan dalam intervensi CO/CD yang dipilih ialah *locality development* dan *social action*. *Locality development* merupakan model pengembangan masyarakat dengan partisipasi aktif berbagai lapisan masyarakat melalui prosedur demokratis, permufakatan, kerja sama dan *local resources*. Model *social action* menyatakan bahwa dalam masyarakat selalu terdapat kelompok yang tertindas, sehingga model ini bekerja lebih terarah kepada kelompok tertindas dengan menggalang kekuatan dari masyarakat untuk mengadakan pembelaan atau advokasi.

2) Teknik

Adapun teknik yang digunakan dalam pelaksanaan program yaitu:

a) KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)

Melakukan KIE untuk merubah perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi secara lisan, tulisan, maupun peragaan kepada warga

b) Advokasi sosial

Melakukan advokasi sosial kepada warga yang benar-benar dalam kondisi tidak mampu agar dapat berubah kepesertaan BPJS Kesehatannya dari mandiri ke JKN-PBI agar mereka dapat tetap mendapatkan jaminan kesehatan.

f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang dibutuhkan

1) Rencana Anggaran Biaya

Dalam melaksanakan program kegiatan ini, pengeluaran biaya yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rencana Anggaran Biaya Profil Jaminan Sosial

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan					
1.	ATK	1	Paket	150.000	150.000
2.	Spanduk	2	Buah	75.000	150.000
3.	Snack Narasumber	2	Dus	20.000	40.000
4.	Snack Panitia	15	Dus	15.000	225.000
5.	Snack Peserta	40	Dus	10.000	400.000
Sub Total Bahan					965.000
Honorarium					
1.	Narasumber (Pengajar/Widyaiswara)	2	OJ	500.000	1.000.000
Sub Total Honorarium					1.000.000
Transportasi					
1.	Transportasi Narasumber	2	OK	150.000	300.000
2.	Transportasi Panitia	15	OK	50.000	750.000
Sub Total Transportasi					1.050.000
TOTAL					3.015.000

2) Alat yang Dibutuhkan

Alat-alat yang dibutuhkan dalam program yang akan dijalankan, antara lain:

Tabel 2.3. Alat yang Dibutuhkan Profil Jaminan Sosial

No	Daftar Alat Yang Dibutuhkan	Jumlah
1.	Speaker	3 buah
2.	Mikrofon	3 buah
3.	Meja Besar	1 buah
4.	Meja Sedang	3 buah
5.	Spanduk	2 buah
6.	Kursi	50 buah
7.	LCD	1 buah
8.	Proyektor	1 buah
9.	Terminal/Kabel Roll	5 buah
10.	Laptop	1 buah

g. Analisis Kelayakan Program

Berikut analisis kelayakan program yang akan dilaksanakan oleh praktikan:

Tabel 2.4. Analisis Kelayakan Program Jaminan Sosial

<div style="text-align: center;"> Internal Eksternal </div>	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
		1. Program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan 2. Narasumber yang dipilih merupakan orang yang unggul di bidang yang berkaitan dengan program 3. Mengajak warga berpartisipasi dengan membentuk TKM
PELUANG (O)	STRATEGI SO:	STRATEGI WO:
1. Adanya dukungan dari pengurus wilayah setempat dan lembaga yang terkait dengan program 2. Sarana dan Prasarana mudah ditemukan di wilayah Kelurahan Babakan Sari 3. Rasa kekeluargaan antar warga yang tinggi	1. Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menciptakan program yang unggul. 2. Membuat materi program yang menarik dan mudah dipahami	1. Menjaga komunikasi tetap berjalan dengan melibatkan pengurus wilayah setempat sebagai pengawasnya. 2. Melakukan pendataan ulang dan validasi
ANCAMAN (T)	STRATEGI ST:	STRATEGI WT:
1. Masyarakat mudah bosan dengan program sosialisasi 2. Masyarakat memiliki banyak kesibukan	1. Menyelingi dengan <i>ice breaking</i> agar audiens tidak bosan. 2. Mengadakan program dengan menyesuaikan waktu luang masyarakat	1. Melakukan monitoring secara berkala 2. Mengadakan evaluasi secara interpersonal untuk melalui komunikasi asertif, sehingga diperoleh pertolongan dan pemecahan masalah yang tepat guna

Melihat hasil analisis kelayakan dari program yang akan dijalankan oleh praktikan menggunakan analisis SWOT dapat diketahui bahwa program ini memiliki kekuatan yang lebih banyak dari kelemahan serta peluang yang lebih besar dibandingkan dengan ancaman yang ada. Hal ini membuktikan bahwa program yang direncanakan layak untuk direalisasikan di Kelurahan Babakan Sari dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait jaminan sosial.

Kemudian untuk mengukur berhasil atau tidaknya program yang akan dijalankan, disini praktikan menggunakan beberapa indikator keberhasilan yaitu antara lain sebagai berikut:

- 1) Indikator Proses
 - a) Peserta menyimak dengan seksama ketika sosialisasi.
 - b) Peserta aktif selama program berlangsung.
 - c) Semua rangkaian program yang dijalankan diikuti oleh peserta hingga selesai.
 - d) Peningkatan pengetahuan dari target sasaran setelah diberikan penyuluhan.
 - e) Terupdatenya DTKS untuk pemindahan kepesertaan warga yang benar-benar tidak mampu.
- 2) Indikator Hasil
 - a) Bertambahnya wawasan warga masyarakat mengenai pentingnya kepesertaan BPJS Kesehatan.
 - b) Menurunnya angka peserta BPJS Mandiri yang menunggak pembayaran di Kelurahan Babakan Sari.
 - c) Seluruh warga masyarakat Kelurahan Babakan Sari tergabung kepesertaan BPJS dan mendapatkan jaminan kesehatan.

h. Jadwal dan Langkah-langkah

1) Jadwal Kegiatan Program

Tabel 2.5. Jadwal Kegiatan Program Jaminan Sosial

No	Waktu	Uraian Kegiatan	Partisipan	Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan
1.	06.30-07.30	Pengecekan perlengkapan yang akan digunakan	Seluruh Panitia	Divisi Logistik	Telah melaksanakan pengecekan sebelum acara dimulai
2.	07.30-07.45	Briefing Panitia	Seluruh Panitia	Ketua Pelaksana	Telah berkoordinasi sebelum acara dimulai
3.	07.45-08.00	Peserta mengisi absensi kehadiran	Peserta Kegiatan	Sekretaris	Semua audiens yang hadir telah didata melalui absensi
4.	08.00-08.15	<i>Pre- test</i>	Peserta kegiatan	Sekretaris	Mengetahui seberapa jauh pengetahuan masyarakat tentang kepesertaan BPJS Kesehatan
5.	08.15-08.30	Pembukaan	a. Pengurus wilayah setempat b. Ketua Pelaksana	Divisi Acara	Dimulainya pelaksanaan program kegiatan
6.	SESI I 08.30-09.30	Penyampaian materi oleh narasumber dan Advokasi Sosial	Peserta Kegiatan	a. Divisi Acara b. Divisi Dokumentasi	Masyarakat mampu memahami tentang pentingnya kepesertaan BPJS Kesehatan dan Kelompok Kurang Mampu Mendapatkan Haknya
	SESI II 09.30-10.30				
7.	10.30-10.45	<i>Post-test</i>	Peserta Kegiatan	Divisi Acara	Mengetahui seberapa pemahaman masyarakat terhadap materi yang disampaikan narasumber
8.	10.45-11.00	Penutupan	MC/Moderator	Divisi Acara	Seluruh rangkaian kegiatan terlaksana

2) Langkah-langkah Pelaksanaan Program

Langkah-langkah pelaksanaan program yang akan dijalankan praktikan adalah sebagai berikut:

a) Tahap Persiapan:

- (1) Mengumpulkan masyarakat yang mau menjadi relawan dalam kegiatan program
- (2) Membentuk Tim Kerja Masyarakat
- (3) Menentukan kepanitian program serta menjelaskan tugas masing-masing divisi.

b) Tahap Perencanaan:

- (1) Mencari informasi dengan menggali data mengenai karakteristik warga
- (2) Mengajukan usul mengenai rencana program yang akan dijalankan terhadap pengurus setempat yang berwenang sekaligus mengurus perizinan program dan tempat yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.
- (3) Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelangsungan program.
- (4) Memperkenalkan kegiatan dengan cara mengadakan sosialisasi di setiap RT.
- (5) Melakukan penginputan data masyarakat yang akan mengikuti kegiatan dari setiap RT.

c) Tahap Pelaksanaan:

Acara dilakukan selama satu hari dengan pembagian dua sesi. Dimana sesi pertama untuk peningkatan kapasitas warga dan tahap kedua untuk kegiatan advokasi sosial. Dalam melaksanakan program, diadakan games di sela-sela kegiatan agar partisipan terhindar dari kebosanan. Pemberian hadiah untuk pemenang games di akhir kegiatan sebagai bentuk apresiasi karena telah mengikuti kegiatan dengan *excited*.

d) Tahap Pengakhiran:

- (1) Penutupan program oleh pengurus wilayah setempat dan Ketua Pelaksana Program.
- (2) Pengisian kuisisioner kesan dan pesan dari peserta untuk program yang dijalankan.
- (3) Mengevaluasi program kegiatan

B. Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

1. Gambaran Umum Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang terus terjadi di Indonesia bahkan dunia hingga saat ini. Permasalahan kemiskinan bukan hanya menyangkut kondisi perekonomian dan finansial seseorang, namun juga berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, politik, geografis, dan sumber daya alam di suatu daerah. Selain itu, kemiskinan juga berkaitan erat dengan kesehatan, pendidikan, jaminan masa depan dan kehidupan sosial masyarakat.

Hingga saat ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan berbagai cara untuk menangani kemiskinan, mengingat jumlah penduduk miskin yang masih belum mampu ditekan dengan maksimal. Menurut data dari BPS, jumlah penduduk miskin pada September 2022 meningkat 0,20 juta orang menjadi 26,36 juta orang. Persentase penduduk miskin perkotaan naik menjadi 7,53 dimana meningkat sebanyak 0,16 juta orang menjadi 11,98 juta orang pada September 2022.

Salah satu dari berbagai macam program yang dijalankan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang termasuk dalam klaster satu Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga. Program Keluarga Harapan yang dimulai sejak tahun 2007 ini merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui pemberian uang tunai yang terdapat syarat bahwa penerima manfaat harus memeriksakan anggota keluarganya ke puskesmas dengan tingkat kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku. Program Keluarga Harapan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengaruh pada pendapatan rumah tangga, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan anak dan keluarga di masa depan, dan mampu membantu mengurangi jumlah pekerja anak.

Pada kenyataannya implementasi Program Keluarga Harapan tidak semulus seperti yang diharapkan. Dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan pada keberlangsungan program ini. Permasalahan yang terjadi antara lain dana bantuan yang disalahgunakan oleh KPM, data yang tidak *ter-update* sehingga penyaluran bantuan salah sasaran, ketercukupan dari dana bantuan tersebut, dan masih banyak lagi. Salah satu masalah yang terjadi di Kelurahan Babakan Sari adalah penyaluran dana bantuan yang tidak optimal karena masalah dalam pencairan dana.

2. Tinjauan Konsep

a. Bantuan Sosial

1) Definisi Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Pemberian Bantuan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi

yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

2) Sifat Bantuan Sosial

Bantuan sosial dapat bersifat:

- a) Sementara, merupakan pemberian bantuan yang tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, serta dapat dihentikan apabila penerima bantuan sosial telah lepas dari risiko sosial, sehingga tidak termasuk lagi dalam kriteria penerima bantuan sosial.
- b) Berkelanjutan, merupakan bantuan yang diberikan secara terus-menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.

3) Pelaksanaan Bantuan Sosial

Pelaksanaan bantuan sosial meliputi:

- a) Pemberdayaan sosial, jenis bantuan untuk: (1) pemberdayaan komunitas adat terpencil; dan/atau (2) perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang masuk kategori risiko sosial.
- b) Rehabilitasi sosial, jenis bantuan untuk: (1) rehabilitasi sosial penyandang disabilitas; (2) rehabilitasi sosial anak; (3) rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; (4) rehabilitasi sosial lanjut usia; dan/atau (5) rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.
- c) Perlindungan dan jaminan sosial, jenis bantuan untuk: (1) program keluarga harapan; (2) korban bencana alam; dan/atau (3) korban bencana sosial.
- d) Penanganan fakir miskin, jenis bantuan untuk: (1) bantuan sosial pangan; (2) rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan; dan/atau (3) bantuan sosial usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama.

4) Kriteria Penerima Bantuan Sosial

Penerima bantuan sosial memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi:

kemiskinan;

- a) keterlantaran;
- b) kedisabilitan;
- c) keterpencilan;
- d) ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku;
- e) korban bencana; dan/atau
- f) korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya

b. Program Keluarga Harapan

1) Definisi Program Keluarga Harapan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

2) Tujuan Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- d) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.
- e) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

3) Sasaran Program Keluarga Harapan

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

4) Kriteria Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

Penerima PKH dapat dibedakan berdasarkan komponen, dimana setiap komponen memiliki kriteria dengan rincian sebagai berikut:

a) Komponen Kesehatan

Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud di atas meliputi: (1) ibu hamil/menyusui; dan (2) anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

b) Komponen Pendidikan

Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi: (1) anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat; (2) anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat; (3) anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan (4) anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

c) Komponen Kesejahteraan Sosial

Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud di atas meliputi: (1) lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan (2) penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat

5) Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan tahapan:

- a) **perencanaan**, dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH yang bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin
- b) **penetapan calon peserta PKH**, dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat PKH menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan yang nantinya ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
- c) **validasi data calon penerima manfaat PKH**, pencocokan data awal calon penerima manfaat PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sesuai dengan kriteria komponen yang dilaksanakan oleh pendamping sosial. Bukti dan fakta kondisi terkini dapat diperoleh melalui pengumpulan informasi dari calon penerima manfaat PKH dan/atau sumber lain yang dapat dipercaya dengan didukung dokumen yang sah.
- d) **penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH**, penetapan KPM berdasarkan hasil validasi data calon penerima manfaat PKH dan/atau hasil verifikasi komitmen dan/atau pemutakhiran data.
- e) **penyaluran bantuan sosial PKH**, penyaluran dilakukan secara non tunai ke rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH yang dapat diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera dan dilaksanakan secara bertahap dalam satu tahun.
- f) **pendampingan PKH**, pendampingan terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial dengan tujuan untuk memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH.
- g) **peningkatan kemampuan keluarga**, dilaksanakan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadi perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH) yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- h) **verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH**, merupakan kegiatan untuk memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesejahteraan sosial yang dilakukan pada masing-masing fasilitas tersebut.

- i) **pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat PKH**, dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH yang dilakukan oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data
- j) **transformasi kepesertaan PKH**, merupakan proses pengakhiran sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH yang dilakukan melalui kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi (pendataan ulang dan evaluasi status kepesertaan dan sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat PKH).

3. Tinjauan Kritis

Bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan kepada kelompok yang berisiko sosial berupa uang, barang, dan jasa. Bantuan sosial disini dapat bersifat sementara dan berkelanjutan. Pelaksanaan bantuan sosial di Indonesia meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan fakir miskin. Penerima bantuan sosial memiliki kriteria masalah sosial yang harus dipenuhi yaitu kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial, korban bencana, serta korban tindak kekerasan.

Program Keluarga Harapan adalah program bersyarat yang memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin dan rentan. Tujuan dari program ini antara lain meningkatkan taraf hidup KPM, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal. Kriteria penerima dari program ada tiga komponen yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Mekanismenya sendiri dalam pelaksanaan program terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu perencanaan, penetapan calon peserta, validasi data, penetapan KPM, penyaluran bantuan, pendampingan, peningkatan kemampuan keluarga, verifikasi komitmen, pemutakhiran data, serta transformasi kepesertaan.

4. Asesmen

a. Identifikasi Masalah

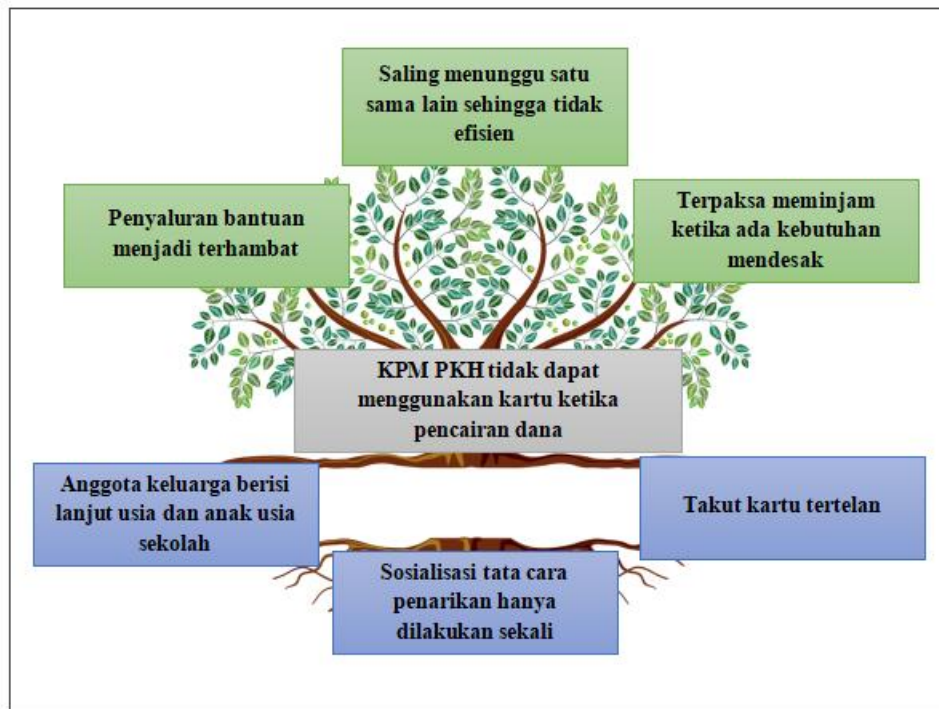
Masyarakat miskin pada dasarnya mempunyai keterbatasan dalam hal mencukupi kebutuhan hidup serta akses terhadap kegiatan sosial ekonomi, hal ini mengakibatkan mereka tertinggal cukup jauh dari masyarakat lain yang lebih berkecukupan. Maka dari itu pemerintah perlu mengembangkan strategi untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan di negeri ini. Dalam hal menangani masalah kemiskinan pemerintah membentuk program-program sebagai

implementasi dari kebijakan yang dibuat. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH), yang dilaksanakan sejak tahun 2007.

Dalam setahun dana disalurkan dengan empat tahapan. tahap pertama, dana tersalur pada bulan Januari, tahap kedua dana tersalur bulan April, tahap ketiga dana tersalur bulan Juli, dan tahap empat pada bulan Oktober. Pencairan dana dilaksanakan dalam bentuk non tunai sehingga diberikan kartu ATM oleh KPM PKH. Pendampingan pencairan dilakukan dengan berkonsultasi langsung kepada KPM terkait penggunaan kartu ATM serta transaksi atau penarikan dana dapat dilakukan pada bank penyalur terkait. Disini komunikasi serta koordinasi antara peserta PKH dan para pelaksana program harus berjalan dengan baik karena akan berdampak memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait program tersebut.

Pada implementasi keberlangsungan Program Keluarga Harapan masih ditemukan beberapa masalah yang terjadi di Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracandong. Berdasarkan hasil asesmen dan observasi di lapangan, diketahui bahwa terdapat masalah terkait penyaluran dana bantuan sosial PKH. Faktor pemicunya sendiri adalah kurangnya pengetahuan dan keterbatasan informasi yang diterima oleh KPM. Hal ini menjadi sangat penting karena dengan adanya masalah tersebut dapat menghambat pemenuhan kebutuhan dasar hidup dari para penerima manfaat PKH.

Dalam menganalisis masalah penyaluran dana bantuan sosial yang ada di Kelurahan Babakan Sari, disini praktikan menggunakan teknologi pohon masalah. Pohon masalah merupakan teknologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebab dan akibat dari suatu masalah yang ada. Sehingga jika ditemukan sebab, akibat, beserta masalah utamanya akan lebih mudah dalam pemecahan masalah tersebut. Berikut merupakan hasil analisis masalah bantuan sosial di Kelurahan Babakan Sari menggunakan pohon masalah.



Gambar 2.2. Pohon Masalah Profil Sumber Dana Bantuan Sosial

1) Penyebab Masalah

a) Sosialisasi tata cara penarikan hanya dilakukan sekali

Sosialisasi tata cara penarikan dana merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan penyaluran dana bantuan sosial PKH. Pada sosialisasi ini para KPM PKH mendapatkan edukasi bagaimana cara untuk menarik saldo dana yang ada di kartu. Menjadi penyebab masalah karena sosialisasi mengenai tata cara penarikan saldo hanya diberikan sekali ketika di awal saja. Padahal ada beberapa KPM PKH yang tidak hadir dalam sosialisasi tersebut karena berhalangan. Kemudian terdapat juga KPM yang memang belum benar-benar mengerti meskipun mengikuti sosialisasi. Hal ini mengakibatkan KPM PKH tersebut tidak dapat menggunakan kartunya sesuai dengan yang seharusnya.

b) Takut kartu tertelan

Kartu Keluarga Sejahtera ini hakikatnya sama seperti kartu ATM biasanya baik dari segi fisik kartu maupun mekanisme penggunaannya. Yang menjadi penyebab masalah disini adalah warga masyarakat ditakutkan oleh bayangan kartunya tertelan sehingga mereka tidak dapat melakukan penarikan saldo. Hal ini membuat mereka tidak berani melakukan penarikan dana karena jika tertelan tidak tahu harus melakukan apa. Kemudian mereka juga tidak

mengetahui alur pengurusannya bagaimana apabila hal tersebut terjadi.

c) Anggota keluarga berisi lanjut usia dan anak usia sekolah

Kelompok rentan yaitu lansia dan anak usia sekolah merupakan komponen dari kriteria penerima manfaat PKH. Dalam hal penyaluran dana bantuan yang menjadi masalah adalah ketika di dalam keluarga tersebut tidak ada yang bisa menggunakan kartu dan anggota keluarga lainnya tidak mampu seperti lansia dan anak usia sekolah. Lanjut usia tidak mengerti bagaimana cara penarikan dana bantuan PKH, mereka juga memiliki keterbatasan dalam aksesibilitas. Sedangkan jika anak usia sekolah mereka disibukkan dengan sekolah dan kegiatan pendukung pendidikannya sehingga tidak bisa untuk selalu diandalkan dalam hal penarikan saldo dana bantuan PKH.

2) Dampak Masalah

a) Penyaluran bantuan menjadi terhambat

Akibat dari KPM PKH yang tidak dapat menggunakan kartunya yaitu membuat penyaluran dana bantuan menjadi terhambat. Dimana seharusnya mereka bisa langsung merasakan manfaatnya namun harus menunggu anggota keluarga atau orang lain yang bisa membantu penarikan saldo dana bantuan PKH. Dengan terhambatnya penerimaan bantuan maka pemenuhan kebutuhan dasar dari KPM PKH juga mau tidak mau harus ikut terlambat. Hal ini tentu membuat mereka KPM PKH menjadi bertambah sangat rentan.

b) Saling menunggu satu sama lain sehingga tidak efisien

Anggota KPM PKH yang tidak bisa menggunakan kartu untuk penarikan saldo dana bantuan selalu menunggu ketua kelompok PKH untuk membantunya. Mereka membentuk kelompok dimana nantinya ketika waktu pencairan akan bersama-sama dengan kelompok tersebut ke bank penyalur untuk penarikan saldo. Karena mereka disini saling menunggu satu sama lain tentu tidak efisien karena memakan waktu. Bahkan sering hingga menunggu beberapa hari untuk penyesuaian jadwal satu sama lain.

c) Terpaksa meminjam ketika ada kebutuhan mendesak

Ketika warga masyarakat tidak dapat menggunakan kartunya maka mereka harus menunggu orang yang dapat membantu mereka. Sehingga apabila ada kebutuhan yang sifatnya mendesak dan harus dipenuhi saat itu juga membuat mereka terpaksa meminjam ke tetangga atau kerabat terlebih dahulu. Hal ini akan memicu penambahan beban KPM PKH karena ditemukan banyak kasus "*besar pasak daripada tiang*" akibat dari meminjam.

3) Fokus Masalah/Masalah Inti/Masalah Utama

Berdasarkan hasil dari asesmen maka permasalahan yang menjadi prioritas di Kelurahan Babakan Sari adalah KPM PKH tidak dapat menggunakan kartu ketika pencairan dana. Permasalahan ini dijadikan fokus masalah oleh praktikan karena merupakan masalah yang serius, dimana apabila mereka tidak dapat menggunakan kartu dengan semestinya maka Program Keluarga Harapan ini tidak dapat dikatakan berhasil. PKH bertujuan untuk menciptakan kemandirian dari para penerima manfaatnya, namun karena hal ini membuat mereka harus bergantung dengan orang lain. Masalah ini adalah pemicu penyaluran dana menjadi terhambat sehingga tidak dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal.

b. Identifikasi Kebutuhan

Melihat dari prioritas masalah yang ada di Kelurahan Babakan Sari mengenai penyaluran dana bantuan sosial PKH yang belum optimal dikarenakan KPM yang tidak dapat menggunakan kartu dengan semestinya, dapat diidentifikasi bahwa kebutuhan KPM PKH adalah perihal pemahaman cara pengaplikasian kartu ketika penarikan saldo. Kemudian KPM PKH juga membutuhkan edukasi bagaimana mekanisme apabila ada kemungkinan kartu tertelan dan prosedur pelaporannya. Sehubungan dengan hal tersebut maka warga masyarakat membutuhkan sosialisasi agar meningkatkan kapasitas KPM sehingga penyaluran dana bantuan sosial PKH dapat berjalan dengan lebih optimal.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Potensi dan sumber yang dimiliki Kelurahan Babakan Sari dan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan yaitu antara lain:

1) Pengurus wilayah setempat

Pengurus wilayah memiliki tugas yaitu memberikan pelayanan masyarakat, memaksimalkan peran serta masyarakat, menjadi sarana penghubung antara masyarakat dengan pemerintah tingkat atas. Dengan adanya pengurus wilayah setempat pada program ini nantinya akan berperan mendukung pelaksanaan program yang ada dengan mendorong masyarakat untuk andil dan berperan aktif serta sebagai pengawas dari jalannya program.

2) Dinas Sosial Kota Bandung

Dinas Sosial memiliki hubungan yang erat dan berpengaruh besar dengan program BPJS Kesehatan. Hal tersebut berhubungan dengan tugas pokok Dinas Sosial yaitu, melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, indentifikasi dan penguatan kapasitas, serta pemberdayaan sosial.

3) Pendamping PKH

Pendamping adalah PKH adalah penyuluh sosial yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada para KPM PKH. Pendamping dengan para KPM memiliki jadwal pertemuan sekali dalam sebulan untuk melakukan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Adanya pendamping

PKH di Kelurahan Babakan Sari ini dapat berperan dalam membantu mengarahkan dan membina KPM PKH untuk mengikuti kegiatan yang sedang berjalan. Selain itu pendamping PKH juga memfasilitasi KPM agar menjadi keluarga yang mandiri.

4) Ketua Kelompok KPM PKH

Para KPM PKH di Kelurahan Babakan Sari membentuk suatu kelompok, dimana dalam kelompok tersebut anggotanya berisikan mereka para KPM PKH. Kelompok KPM PKH ini seperti wadah yang bermanfaat dalam mempererat hubungan dari setiap anggotanya. Dengan adanya kelompok KPM PKH ini berperan dalam meningkatkan semangat serta motivasi para KPM PKH di setiap kegiatan. Para anggota dalam kelompok ini juga saling memberi dukungan satu sama lain. Ketua kelompok disini bertugas membantu pendamping PKH dalam mengarahkan anggotanya.

5) Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

LINMAS adalah adalah satuan perlindungan yang bertugas untuk ikut serta memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta membantu kegiatan sosial masyarakat. Adanya LINMAS di Kelurahan Babakan Sari dapat berperan sebagai tim keamanan pada program yang bertugas menjaga kegiatan agar tetap kondusif sesuai dengan tujuan awal.

5. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan di Indonesia dicanangkan untuk membantu penduduk miskin klaster terbawah berupa bantuan bersyarat. PKH memiliki manfaat yakni memberikan *income effect* kepada RTSM melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Tujuannya sendiri adalah untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak dimasa depan serta memberikan kepastian kepada anak akan masa depannya.

Program PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat. PKH selalu diupayakan untuk terus meningkatkan jumlah penerima manfaat setiap tahun sejak pertama diluncurkan pada tahun 2007. Setelah peserta ditetapkan dan dibuatkan buku rekening, maka bantuan dana PKH didapatkan masyarakat sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun, yaitu setiap bulan Januari, April, Juli, dan bulan Oktober. Dana bantuan PKH ini bisa langsung diambil masyarakat melalui bank sesuai buku rekening yang dimiliki.

Terkait dengan penyaluran dana bantuan sosial PKH, berdasarkan hasil asesmen dan observasi di lapangan dapat diidentifikasi bahwa sebagian KPM terkendala dalam hal penggunaan kartu ketika pencairan. Faktor pemicu dari masalah ini adalah karena tidak mengerti penggunaan mesin ATM dan selalu dibayangi ketakutan karena tidak tahu bagaimana jika kartunya tertelan. Kemudian yang menjadi penyebab berikutnya adalah dalam keluarga KPM beranggotakan lanjut usia yang terbatas dalam aksesibilitas dan anak usia sekolah yang belum paham maupun sulit menyesuaikan waktu. Hal ini tentu membuat penyaluran dana bantuan menjadi terhambat dan menimbulkan masalah-masalah baru yang lebih serius dan berdampak langsung pada kehidupan KPM.

Melihat dari fokus masalah yang diangkat oleh praktikan, maka dari itu diperlukan adanya program yang memberikan edukasi kepada KPM PKH. Masalah ini menjadi sangat penting untuk diselesaikan mengingat tujuan dari adanya PKH adalah untuk membuat KPM menjadi keluarga yang tangguh dan mandiri. Jika kapasitas KPM untuk memahami penggunaan kartu meningkat, berakibat pada penyaluran dana bantuan sosial yang akan berjalan dengan optimal karena kebermanfaatannya bisa langsung dirasakan. Rencana program ini disusun dengan memanfaatkan potensi dan sumber yang ada di Kelurahan Babakan Sari sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.

b. Tujuan Umum dan Khusus

1) Tujuan Umum

Program yang direncanakan oleh praktikan memiliki tujuan untuk membantu mengoptimalkan penyaluran dana bantuan sosial PKH yang masih belum berjalan dengan lancar melalui peningkatan kapasitas KPM PKH.

2) Tujuan Khusus

Secara lebih spesifik tujuan dari pelaksanaan program yang direncanakan oleh praktikan antara lain:

- a) Meningkatkan keterampilan KPM PKH sehingga dapat menggunakan kartu untuk penarikan saldo dana bantuan
- b) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman KPM PKH sehingga tidak dibayangi rasa takut kartu tertelan
- c) Menciptakan KPM PKH yang mandiri dan tidak selalu bergantung pada orang lain.

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan penyaluran bantuan sosial, praktikan merancang program yaitu **“Peningkatan Kapasitas Menuju KPM PKH Yang Mandiri”**

Bentuk kegiatan dari program ini sendiri yaitu:

- 1) Pelatihan tata cara penarikan saldo dana bantuan sosial menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera
- 2) Edukasi mengenai kartu tertelan beserta bagaimana prosedur pengurusannya.

d. Sistem Partisipan

Tabel 2.6. Sistem Partisipan Profil Sumber Dana Bantuan Sosial

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	<i>Inisiator System</i> (pemrakarsa/ yang memiliki ide untuk membuat suatu program)	Pekerja Sosial
2.	<i>Change Agent System</i> (orang atau lembaga yang mengkoordinasikan usaha perubahan)	a. Pekerja Sosial b. Pengurus wilayah setempat c. Dinas Sosial Kota Bandung
3.	<i>Client System</i> (orang/lembaga yang menerima perubahan perilaku/menerima tujuan program)	KPM PKH yang tidak dapat menggunakan kartu ketika pencairan dana
4.	<i>Support System</i> (orang/lembaga yang membantu terlaksananya program)	a. Pengurus wilayah setempat b. Dinas Sosial Kota Bandung c. Pendamping PKH d. Ketua Kelompok KPM PKH e. LINMAS
5.	<i>Controlling System</i> (orang/lembaga yang mengontrol dan mengawasi jalannya program)	a. Pengurus wilayah setempat b. Dinas Sosial Kota Bandung
6.	<i>Implementing SystemI</i> (orang/lembaga yang melaksanakan program)	a. Pekerja Sosial b. Pengurus wilayah setempat c. Dinas Sosial Kota Bandung d. Pendamping PKH e. Ketua Kelompok KPM PKH f. LINMAS g. Seluruh KPM PKH di Kelurahan Babakan Sari
7.	<i>Target System</i> (orang/lembaga yang menjadi sasaran program)	Seluruh KPM PKH di Kelurahan Babakan Sari
8.	<i>Action System</i> (orang/ lembaga yang bersama pekerja sosial berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas dan mencapai tujuan usaha perubahan)	a. Pengurus wilayah setempat b. Dinas Sosial Kota Bandung c. Pendamping PKH d. Ketua Kelompok KPM PKH e. LINMAS

e. Metode dan Teknik

1) Metode

Metode yang digunakan untuk mengatasi masalah KPM PKH tidak dapat menggunakan kartu ketika pencairan dana di Kelurahan Babakan Sari, yaitu dengan menggunakan metode Community Organization dan Community Development (CO/CD). Pemilihan metode CO/CD dilakukan agar Seluruh KPM PKH di Kelurahan Babakan Sari dapat mengartikulasikan masalah-masalahnya, kebutuhan-kebutuhannya, menelaah kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dimiliki, serta menganalisis kemungkinan-kemungkinan pemecahannya, dan mengorganisir kegiatan yang dilakukan.

Model yang digunakan disini adalah *Locality development*. *Locality development* adalah model pengembangan masyarakat yang dilakukan dengan partisipasi aktif berbagai lapisan masyarakat. Perhatian dalam model *locality development* adalah prosedur demokratis, permufakatan, serta kerja sama suka rela

2) Teknik

- a) Focus Group Discussion (FGD) untuk memudahkan interaksi satu sama lain. Partisipasi aktif dari KPM memudahkan pekerja sosial dalam memberikan dorongan psikososial keluarga miskin.
- b) Penyuluhan sosial memberikan penerangan/penjelasan kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang belum diketahui untuk dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyuluhan ini diberikan untuk meningkatkan pemahaman dari KPM PKH dalam rangka peningkatan kapasitas.

f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan

1) Rencana Anggaran Biaya

Dalam melaksanakan program kegiatan ini, pengeluaran biaya yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7. RAB Profil Sumber Dana Bantuan Sosial

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan					
1.	ATK	1	Paket	150.000	150.000
2.	<i>Stand Banner</i>	2	Buah	120.000	240.000
3.	Spanduk	1	Buah	75.000	75.000
4.	<i>Snack</i> Narasumber	2	Dus	20.000	40.000
5.	<i>Snack</i> Panitia	10	Dus	15.000	150.000
6.	<i>Snack</i> Peserta	30	Dus	10.000	300.000
Sub Total Logistik					955.000
Honorarium					
1.	Narasumber (Pengajar/Widyaiswara)	2	OJ	500.000	1.000.000
Sub Total Honorarium					1.000.000
Transportasi					
1.	Transportasi Narasumber	2	OK	150.000	300.000
2.	Transportasi Panitia	10	OK	50.000	500.000
Sub Total Transportasi					800.000
TOTAL					2.755.000

2) Alat yang Dibutuhkan

Alat-alat yang dibutuhkan dalam program yang akan dijalankan, antara lain:

Tabel 2.8. Alat yang Dibutuhkan Profil Sumber Dana Bantuan Sosial

No	Daftar Alat Yang Dibutuhkan	Jumlah
1.	Speaker	2 buah
2.	Mikrofon	2 buah
3.	Meja Sedang	4 buah
4.	<i>Stand Banner</i>	2 buah
5.	Spanduk	1 buah
6.	Kursi	40 buah
7.	LCD	1 buah
8.	Proyektor	1 buah
9.	Terminal/Kabel Roll	5 buah
10.	Laptop	1 buah

g. Analisis Kelayakan Program

Berikut adalah analisis kelayakan program yang akan dijalankan oleh praktikan:

Tabel 2.9. Analisis Kelayakan Program Sumber Dana Bantuan Sosial

INTERNAL EKSTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan badan atau lembaga yang dapat menangani permasalahan. 2. Memberikan pengetahuan dan keterampilan sesuai kebutuhan KPM 3. Waktu program yang fleksibel 	Sebagian KPM PKH tidak mengikuti perkembangan teknologi sehingga sering kali tertinggal informasi
PELUANG (O)	STRATEGI SO:	STRATEGI WO:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Antusiasme KPM PKH tinggi ketika mengikuti kegiatan 2. Adanya kelompok yang saling memberi informasi dan motivasi 3. Dukungan dari pengurus wilayah setempat berupa sarana dan prasarana 	Berkolaborasi menyukseskan program sehingga tercapai tujuan program.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok digunakan untuk media bertukar informasi agar tidak ada lagi yang tertinggal. 2. Memberi motivasi kepada PKM untuk ikut berkembang bersama teknologi
ANCAMAN (T)	STRATEGI ST:	STRATEGI WT:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mayoritas KPM PKH berusia lanjut 45 ke atas 2. Kurangnya kedekatan dari pendamping PKH dan KPM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan media penyampaian yang mudah dipahami oleh KPM PKH 2. Menjalinkan komunikasi antara KPM PKH dengan pendamping agar memudahkan koordinasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan hubungan baik yang hangat antara KPM PKH dan pendamping agar bisa saling bertukar informasi 2. Memberikan arahan untuk memndapatkan akses informasi yang terpercaya

Melihat hasil analisis kelayakan dari program yang akan dijalankan oleh praktikan menggunakan analisis SWOT dapat diketahui bahwa program ini memiliki kekuatan yang lebih banyak dari kelemahan serta peluang yang lebih besar dibandingkan dengan ancaman yang ada. Hal ini membuktikan bahwa program yang direncanakan layak untuk direalisasikan di Kelurahan Babakan Sari dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait bantuan sosial.

Kemudian untuk mengukur berhasil atau tidaknya program yang akan dijalankan, disini praktikan menggunakan beberapa indikator keberhasilan yaitu antara lain sebagai berikut:

- 1) Indikator Proses
 - a) Peserta menyimak dengan seksama ketika sosialisasi.
 - b) Peserta aktif selama program berlangsung.
 - c) Semua rangkaian program yang dijalankan diikuti oleh peserta hingga selesai.
 - d) Peningkatan pengetahuan dari target sasaran setelah diberikan penyuluhan.
 - e) Peningkatan keterampilan penggunaan kartu ketika pencairan dana setelah diberikan pelatihan.
- 2) Indikator Hasil
 - a) Bertambahnya wawasan KPM PKH mengenai penggunaan kartu dan prosedur kartu tertelan
 - b) Meningkatnya kemandirian KPM PKH di Kelurahan Babakan Sari
 - c) Penyaluran bantuan sosial PKH berjalan dengan optimal

h. Jadwal dan Langkah-langkah

1) Jadwal Kegiatan

Berikut di bawah ini adalah jadwal kegiatan dari program yang akan dilaksanakan:

Tabel 2.10. Jadwal Kegiatan Program Sumber Dana Bantuan Sosial

No	Waktu	Uraian Kegiatan	Partisipan	Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan
1.	06.30-07.30	Pengecekan perlengkapan yang akan digunakan	Seluruh Panitia	Divisi Logistik	Telah melaksanakan pengecekan sebelum acara dimulai
2.	07.30-07.45	Briefing Panitia	Seluruh Panitia	Ketua Pelaksana	Telah berkoordinasi sebelum acara dimulai
3.	07.45-08.00	Peserta mengisi absensi kehadiran	Peserta Kegiatan	Sekretaris	Semua audiens yang hadir telah didata melalui absensi
4.	08.00-08.15	<i>Pre- test</i>	Peserta kegiatan	Sekretaris	Mengetahui seberapa jauh pengetahuan masyarakat tentang penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera
5.	08.15-08.30	Pembukaan	a. Pengurus wilayah setempat b. Ketua Pelaksana	Divisi Acara	Dimulainya pelaksanaan program kegiatan
6.	SESI I 08.30-09.30	Penyampaian materi oleh narasumber	Peserta Kegiatan	a. Divisi Acara b. Divisi Dokumentasi	Masyarakat mampu memahami tentang penggunaan kartu ketika pencairan dana dan prosedur apabila kartu tertelan di mesin ATM
	SESI II 09.30-10.30				
7.	10.30-10.45	<i>Post-test</i>	Peserta Kegiatan	Divisi Acara	Mengetahui seberapa pemahaman masyarakat terhadap materi yang disampaikan narasumber
8.	10.45-11.00	Penutupan	MC/Moderator	Divisi Acara	Seluruh rangkaian kegiatan terlaksana

2) Langkah-langkah

Langkah-langkah pelaksanaan program yang akan dijalankan penulis adalah sebagai berikut:

a) Tahap Persiapan

- (1) Membentuk kepanitiaan program
- (2) Membagi dan menjelaskan tugas pokok setiap divisi.

b) Tahap Perencanaan

- (1) Mengajukan usul mengenai rencana program yang akan dijalankan terhadap pengurus setempat yang berwenang sekaligus mengurus perizinan program dan tempat yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelangsungan program.
- (3) Memperkenalkan kegiatan dengan cara mengadakan sosialisasi di setiap RT.
- (4) Melakukan penginputan data masyarakat yang akan mengikuti kegiatan dari setiap RT.

c) Tahap Pelaksanaan

Acara dilakukan selama satu hari dengan pembagian dua sesi. Dimana sesi pertama untuk peningkatan pengetahuan serta keterampilan dalam penarikan dana menggunakan kartu dan tahap kedua untuk kegiatan edukasi mengenai kartu tertelan. Dalam melaksanakan program, diadakan *games* di sela-sela kegiatan agar partisipan terhindar dari kebosanan. Pemberian hadiah untuk pemenang *games* di akhir kegiatan sebagai bentuk apresiasi karena telah mengikuti kegiatan dengan *excited*.

d) Tahap Pengakhiran

- (1) Penutupan program oleh pengurus wilayah setempat dan Ketua Pelaksana Program.
- (2) Pengisian kuisioner kesan dan pesan dari peserta untuk program yang dijalankan.
- (3) Mengevaluasi program kegiatan.

C. Profil Analisis Pemberdayaan Sosial

1. Gambaran Umum Masalah

Sampah pada dasarnya adalah bahan-bahan yang sudah tidak digunakan lagi oleh penggunanya. Jika dibuang sampah akan mengalami pembusukan, namun berdasarkan jenisnya pembusukan sampah memerlukan waktu yang bervariasi. Dengan adanya pemilahan jenis sampah, sampah-sampah yang ada tidak tertimbun lebih lama dan tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk lainnya. Dari data mengenai lama pembusukan sampah masyarakat bisa tahu seberapa pentingnya pemilahan sampah sesuai jenisnya. Dengan pemisahan sampah juga dapat membantu kemungkinan terjadinya resiko pencemaran lingkungan akibat terbuangnya sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti baterai, botol pembasmi serangga, obat kadaluarsa, dll.

Sampah merupakan salah satu masalah krusial di masyarakat yang terkadang dianggap remeh, namun apabila tidak dikelola dengan baik maka dapat menimbulkan penyakit dan tidak enak dipandang mata. Agar sampah tidak menumpuk dan mudah diolah/didaur ulang, maka sampah perlu dipilah terlebih dahulu. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah. Pemilahan sampah merupakan kegiatan yang penting dalam penanganan dan pewadahan sampah di sumbernya, karena memudahkan dalam proses manajemen persampahan. Apabila sampah sudah dipilah maka lebih mudah melakukan daur ulang.

Pemilahan sampah oleh masyarakat masih belum banyak dilakukan. Padahal peran serta masyarakat dalam mengurangi volume sampah dengan cara memilah sampah dari sumber asalnya sangat penting. Rumah tangga merupakan salah satu sumber asal sampah terbesar di Kota Bandung sebesar 65,6%. Oleh karena itu peran rumah tangga dalam pemilahan sampah merupakan ujung tombak dalam pengelolaan sampah secara keseluruhan.

2. Tinjauan Konsep

a. Konsep Pemberdayaan Sosial

1) Definisi Pemberdayaan

Menurut Edi Suharto (2010:57) Pemberdayaan atau pemberdayaan (*empowerment*) secara konseptual berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan.

Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya

2) Definisi Pemberdayaan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang No 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial dijelaskan bahwa pemberdayaan sosial merupakan sebuah intervensi pekerja sosial yang ditujukan untuk memberdayakan individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami masalah sosial agar mampu meningkatkan kualitas kehidupannya secara mandiri dan meningkatkan peran serta Lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

b. Konsep Sampah

1) Definisi Sampah

Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Kemudian yang dimaksud dengan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Berdasarkan SK SNI tahun 1990, sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan dan melindungi investasi pembangunan (Subekti, 2009).

2) Jenis-jenis Sampah

Dalam Undang- Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jenis dan sumber sampah yang diatur adalah :

a) Sampah Rumah Tangga

Yaitu sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan dari proses alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah atau dari kompleks perumahan.

b) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Yaitu sampah rumah tangga yang berasal bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan

berasal dari sumber lain seperti pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, dan lainnya.

c) Sampah Spesifik

Yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi, sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti baterai bekas, bekas toner, dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis), sampah akibat bencana, puing bongkaran, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara periode (sampah hasil kerja bakti).

3) Sifat Fisik Sampah

Menurut Gilbert dkk. dalam Artiningsih (2008) berdasarkan keadaan fisiknya sampah dikelompokkan atas :

a) Sampah basah (*garbage*)

Sampah golongan ini merupakan sisa-sisa pengolahan atau sisa-sisa makanan dari rumah tangga atau merupakan timbunan hasil sisa makanan, seperti sayur mayur, yang mempunyai sifat mudah membusuk, sifat umumnya adalah mengandung air dan cepat membusuk sehingga mudah menimbulkan bau.

b) Sampah kering (*rubbish*)

Sampah golongan ini memang dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

(1) Golongan sampah tak lapuk

Sampah jenis ini benar-benar tak akan bisa lapuk secara alami, sekalipun telah memakan waktu bertahun-tahun, contohnya kaca dan mika.

(2) Golongan sampah tak mudah lapuk

Sekalipun sulit lapuk, sampah jenis ini akan bisa lapuk perlahan-lahan secara alami. Sampah jenis ini masih bisa dipisahkan lagi atas sampah yang mudah terbakar, contohnya seperti kertas dan kayu, dan sampah tak mudah lapuk yang tidak bisa terbakar, seperti kaleng dan kawat.

4) Mekanisme Pengelolaan Sampah

Mekanisme pengelolaan sampah dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi, kegiatan-kegiatan berikut :

- a) Pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan lainnya), mengguna ulang sampah dari sumbernya dan/atau di tempat pengolahan, dan daur ulang sampah di sumbernya dan atau di tempat pengolahan. Pengurangan sampah akan diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

- b) Penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan pemrosesan aktif kegiatan pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan ke media lingkungan

c. *Eco-Enzyme*

Eco Enzyme adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti kulit buah-buahan dan sayuran, gula (gula coklat, gula merah atau gula tebu), dan air. Produk *Eco-Enzyme* merupakan produk ramah lingkungan yang mudah digunakan dan mudah dibuat. Pembuatan *Eco -Enzyme* hanya membutuhkan air, gula sebagai sumber karbon, dan sampah organik sayur dan buah. Pemanfaatan *Eco-enzyme* dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah rumah tangga terutama sampah organik yang komposisinya masih tinggi.

Selain membantu mengurangi limbah atau sampah organik basah sehingga zero waste. *Eco-enzyme* memiliki banyak manfaat untuk kehidupan sehari-hari, khususnya saat pandemi sekarang ini. *Eco-enzyme* itu sendiri, dapat dimanfaatkan sebagai:

- 1) Pembersih lantai, sangat efektif untuk membersihkan lantai rumah.
- 2) Desinfektan, dapat digunakan sebagai antibakteri di bak mandi.
- 3) *Hand sanitizer*, dapat digunakan sebagai antibakteri ketika tidak ada air dan sabun.
- 4) Insektisida, digunakan untuk membasmi serangga (dengan mencampurkan enzim dengan air dan digunakan dalam bentuk spray).
- 5) Cairan pembersih di selokan, terutama selokan kecil sebagai saluran pembuangan air kotor (Rochyani dkk., 2020).

Menurut Megah dkk. (2017) dan Dewi dkk. (2007) menjelaskan bahwa sistem pengolahan sampah organik dengan memanfaatkan kulit buah-buahan dengan sebutan *Eco-enzym*. *Eco-Enzyme* menggunakan bahan yang murah dan mudah dilakukan dengan proses fermentasinya selama 3 bulan, namun hasil larutan ini mempunyai manfaat yang banyak. Selama proses fermentasinya menghasilkan gas O₃ (ozon) yang sangat dibutuhkan atmosfer.

3. Tinjauan Kritis

Pemberdayaan adalah serangkaian proses untuk memperkuat kekuasaan kelompok lemah. Kemudian jika pemberdayaan sosial adalah intervensi yang ditujukan untuk memberdayakan mereka yang mengalami masalah sosial agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Pada profil ini akan dibahas mengenai pemberdayaan sosial yang difokuskan kepada pengelolaan sampah untuk dapat membuat kehidupan warga masyarakat tetap terus berkelanjutan. Sampah sendiri adalah sisa dari kegiatan sehari-hari manusia. Jenis sampah ada tiga yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, serta sampah spesifik yang memerlukan penanganan khusus. Sampah memiliki dua sifat khusus yaitu sampah basah dan sampah kering. Kemudian untuk pengelolaan sampah mekanismenya ada dua yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah di profil ini nantinya akan terfokus pada pemilahan sampah dan pemanfaatannya. *Eco-enzyme* adalah fermentasi dari limbah rumah tangga yang digunakan untuk bahan kebersihan. Dimana manfaatnya yaitu untuk pembersih lantai, disinfektan, hand sanitizer, insektisida, serta cairan pembersih selokan. Proses fermentasi *Eco-enzyme* sendiri membutuhkan waktu kurang lebih tiga bulan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

4. Asesmen

a. Identifikasi Masalah

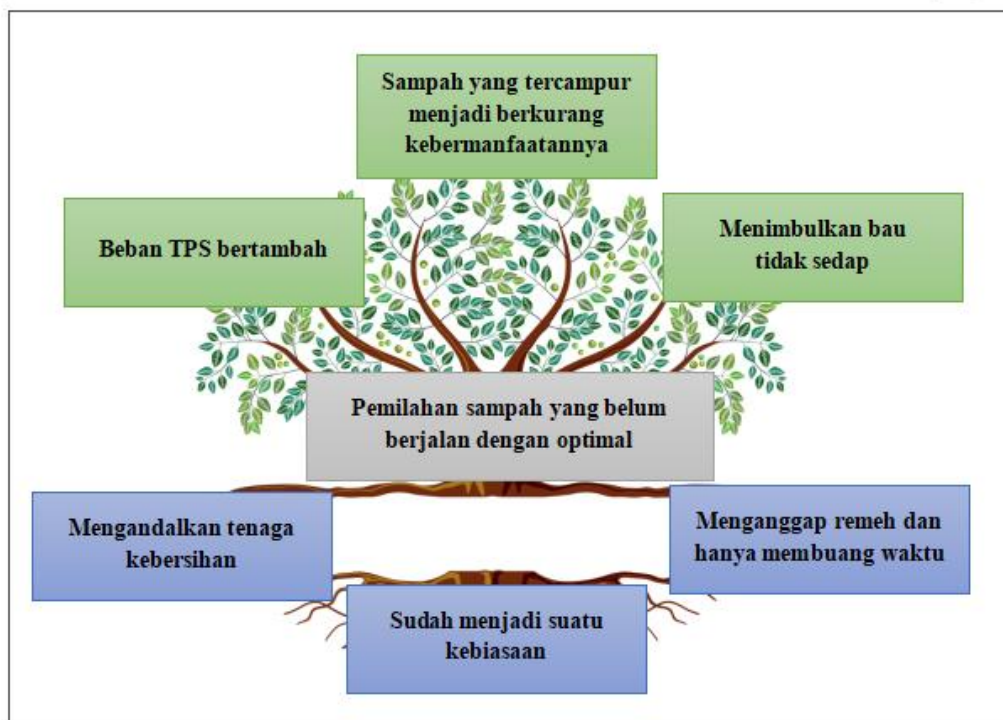
Sampah akan terus berproduksi dan tidak akan pernah berhenti selama manusia masih ada. Tidak menutup kemungkinan jumlah sampah yang dihasilkan oleh penduduk bumi ini akan bertambah. Sampah merupakan bentuk konsekuensi dari aktivitas manusia dan volumenya berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Jika tidak ditangani secara efektif dan efisien, keberadaan sampah di alam tentu akan berbalik mengakibatkan rusaknya kehidupan di sekitarnya.

Pemilahan sampah bertujuan untuk mempermudah pengelolaan sampah pada tahap selanjutnya. Selain memudahkan pengelolaan sampah selanjutnya, pemilahan sampah organik dan anorganik dapat mengurangi pencemaran udara yang diakibatkan oleh penumpukan sampah yang masih tercampur antara sampah organik dan anorganik. Pencemaran udara dapat menimbulkan masalah kesehatan, terutama yang berhubungan dengan paru-paru dan pernapasan. Manfaat lain dari pemilahan sampah dari rumah yaitu dapat menambah nilai ekonomi dari hasil sampah yang terpilah tersebut.

Permasalahan yang terjadi di Kelurahan Babakan Sari adalah sampah yang dibuang oleh masyarakat ditemukan tidak

dipilah antara sampah organik dan non organik. Hal tersebut menyebabkan pengelolaan sampah menjadi lebih sulit dan tidak efisien. Sampah yang tidak dipilah ini menjadi beban TPA menjadi berat dan umur penggunaannya semakin pendek. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut menjadi berdampak lebih serius.

Praktikan disini melakukan analisis masalah terkait pemilahan sampah yang belum berjalan dengan optimal di Kelurahan Babakan Sari melalui pohon masalah. Pohon masalah merupakan suatu teknik untuk menggambarkan rangkaian hubungan sebab akibat serta beberapa faktor yang saling terkait. Pohon masalah biasanya digunakan pada tahap perencanaan. Berikut hasil analisis pohon sebab akibat masalah pemilahan sampah yang terdapat di Kelurahan Babakan Sari.



Gambar 2.3. Pohon Masalah Profil Pemberdayaan Sosial

1) Penyebab Masalah

a) Sudah menjadi suatu kebiasaan

Membuang sampah tanpa memilah terlebih dahulu dapat dikatakan sudah sangat lama tertanam di kehidupan warga masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam kesehariannya kebiasaan untuk memilah sampah tidak pernah diajarkan. Mereka berpikir bahwa membuang sampah pada tempatnya sudah cukup tanpa memilahnya terlebih dahulu. Maka dari itu mereka tidak memilah sampah sebelum membuangnya karena sudah menjadi suatu kebiasaan dan sangat sulit untuk diubah.

b) Menganggap remeh dan hanya membuang waktu

Banyak masyarakat yang menganggap memilah sampah bukanlah sebuah keharusan. Memilah sampah ini tidak penting dan tidak dapat dirasakan secara langsung kebermanfaatannya. Masyarakat juga beranggapan bahwa membuang sampah dengan cara memilah-milah terlebih dahulu merupakan hal yang merepotkan dan akan menyita waktu mereka. Sampah-sampah ini dianggap remeh padahal dampaknya sangat besar bagi kehidupan generasi anak cucunya nanti.

c) Mengandalkan tenaga kebersihan

Awalnya tenaga kebersihan hanya bertugas untuk membantu meringankan warga masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Namun dengan adanya tenaga kebersihan warga masyarakat akhirnya selalu mengandalkan mereka bahkan dalam hal-hal kecil seperti pemilahan sampah. Padahal pemilahan sampah merupakan hal yang mudah apabila dilakukan dari lapisan terkecil yaitu rumah tangga. Warga masyarakat menyatakan bahwa mereka sudah disibukkan dengan pekerjaannya dan tidak mau direpotkan untuk memilah sampah.

2) Dampak Masalah

a) Beban Tempat Penampungan Sementara bertambah

Dalam siklus pembuangan sampah, TPS seharusnya hanya untuk tempat transit sementara sampah sebelum dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir. Pada dasarnya sampah tidak boleh sampai ada di TPS hingga beberapa hari. Karena adanya permasalahan di TPA Sarimukti Bandung membuat pengangkutan sampah hanya sehari sekali dan meninggalkan sisa. Ditambah lagi ketika sampah yang datang ternyata belum dipilah, hal ini akan membuat petugas yang seharusnya melanjutkan pemrosesan sampah organik dan anorganik waktunya digunakan untuk memilah sampah terlebih dahulu.

b) Sampah yang tercampur menjadi berkurang kebermanfaatannya

Sampah yang tidak melewati tahap pemilahan sampah dan tercampur antara anorganik dan organik maka akan berkurang nilai manfaat dan harganya. Misalnya sampah-sampah anorganik yang sebenarnya masih dapat didaur ulang, namun karena telah terkontaminasi dengan sampah organik yang mengandung air dan minyak maka nilai ekonomisnya akan menurun. Akibatnya sampah-sampah tersebut nantinya akan berakhir di TPA karena dinilai akan membutuhkan biaya yang lebih besar apabila dilakukan proses daur ulang.

c) Menimbulkan bau tidak sedap

Salah satu penyebab sampah menjadi berbau menyengat adalah proses pembusukan sampah organik yang terperangkap di dalam plastik dan jenis sampah anorganik lainnya, sehingga proses penguraian sampah oleh mikroorganisme (dekomposisi) terjadi secara tanpa kehadiran oksigen (anaerob) dan menghasilkan gas metana. Apabila tidak ada perubahan bau tidak sedap ini tentunya akan mengganggu kenyamanan karena sampah tanpa dipilah terus-menerus ditumpuk, belum lagi jika hujan mengguyur baunya akan semakin menjadi-jadi. Selain itu bau sampah ini juga berdampak pada kesehatan baik makhluk hidup maupun bumi karena gas yang dihasilkan dapat mengikis lapisan ozon.

3) Fokus Masalah/Masalah Inti/Masalah Utama

Berdasarkan dari hasil asesmen, maka dapat diketahui masalah yang menjadi prioritas di Kelurahan Babakan Sari adalah pemilahan sampah yang belum berjalan dengan optimal. Permasalahan ini merupakan masalah yang sangat serius sehingga harus diprioritaskan agar segera dapat diselesaikan. Sampah yang dibuang tanpa dipilah terlebih dahulu akan berpengaruh pada keberlangsungan kehidupan di muka bumi karena masalah ini pemicu masalah-masalah lain yang mengkhawatirkan. Sampah tidak hanya mengancam kesehatan saja jika tidak dipilah, namun juga bisa menimbulkan kematian.

b. Identifikasi Kebutuhan

Jika dilihat dari masalah yang menjadi prioritas di Babakan Sari yaitu mengenai pemilahan sampah yang belum optimal dikarenakan masyarakat yang tidak menganggap penting hal tersebut dan hanya mengandalkan tenaga kebersihan, dapat diidentifikasi bahwa kebutuhan warga masyarakat adalah pemahaman mengenai urgensi dari pemilahan sampah. Kemudian warga masyarakat juga membutuhkan adanya peningkatan keterampilan pengolahan sampah rumah tangga yang kebermanfaatannya dapat langsung dirasakan oleh mereka. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa warga masyarakat memerlukan penyuluhan sosial mengenai pemilahan sampah dan pelatihan dalam pemanfaatan sampah.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Potensi dan sumber yang dimiliki Kelurahan Babakan Sari dan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan yaitu antara lain:

1) Pengurus wilayah setempat

Pengurus wilayah memiliki tugas yaitu memberikan pelayanan masyarakat, memaksimalkan peran serta masyarakat, menjadi sarana penghubung antara masyarakat dengan pemerintah tingkat atas. Dengan adanya pengurus wilayah setempat pada program ini nantinya akan berperan mendukung pelaksanaan program yang ada dengan

mendorong masyarakat untuk andil dan berperan aktif serta sebagai pengawas dari jalannya program.

2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Baandung

DLHK memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di bagian persampahan dan air limbah. Dengan adanya DLHK di Kelurahan Babakan Sari dapat menjadi pihak yang memberi edukasi kepada masyarakat sekaligus mengontrol pengelolaan lingkungan. Ketika pelaksanaan program nantinya DLHK bertugas memfasilitasi dan memonitoring jalannya program karena berhubungan dengan keberlanjutan lingkungan.

3) Karang Taruna

Karang taruna sebagai kepanjangan tangan dari pihak Kelurahan bertugas membantu mencegah pemicu masalah-masalah yang akan timbul dan menimbulkan kerentanan sosial. Karang taruna adalah suatu organisasi kaum muda dimana selain sebagai wadah pengumpulan aspirasi mereka, namun juga pengembangan potensinya. Peran dari karang taruna di pelaksanaan program ini adalah membantu mensukseskan dengan ikut berpartisipasi di kepanitiaan karena kaum muda akan lebih dipercaya oleh warga masyarakat.

4) Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

LINMAS adalah adalah satuan perlindungan yang bertugas untuk ikut serta memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta membantu kegiatan sosial masyarakat. Adanya LINMAS di Kelurahan Babakan Sari dapat berperan sebagai tim keamanan pada program yang bertugas menjaga kegiatan agar tetap kondusif sesuai dengan tujuan awal.

5. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Permasalahan sampah merupakan permasalahan yang cukup rumit karena melibatkan berbagai pihak. Masalah sampah di Indonesia juga mengalami tantangan yang besar khususnya dalam aspek kesadaran masyarakat terkait kebiasaan membuang sampah pada tempatnya serta memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Untuk mengurangi dan menangani sampah tersebut harus ada sistem pengelolaan yang menyeluruh dan berkesinambungan, sehingga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat menjadi lebih baik serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Sampah adalah material sisa dari aktivitas manusia yang tidak memiliki keterpaksaan, karenanya harus dikelola. Tanpa

pengelolaan secara baik dan benar, sampah dapat menimbulkan kerugian karena akan menyebabkan banjir, meningkatnya pemanasan iklim, menimbulkan bau busuk, mengganggu keindahan, memperburuk sanitasi lingkungan dan ancaman meningkatnya berbagai macam penyakit.

Pemahaman masyarakat mengenai pemilahan sampah masih sangat kurang. Dengan tidak adanya pemahaman tersebut, kebiasaan untuk memilah sampah pun tidak terbentuk di kalangan masyarakat. Perlu adanya pemahaman yang dilakukan sejak dini dengan diiringi tindak nyata yang dilakukan secara terus menerus. Ketika pemahaman sudah ditanamkan dan dilakukan secara berkelanjutan maka akan menjadi sebuah kebiasaan yang nantinya akan mengurangi penumpukan sampah.

Berdasarkan prioritas masalah yang dipilih, praktikan merancang suatu program pemberdayaan bagi warga masyarakat di Kelurahan Babakan Sari. Pada program ini nantinya memberikan peningkatan pemahaman dan keterampilan dari warga masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Mengingat bahwa permasalahan ini sangat penting dan perlu segera diselesaikan karena menyangkut keberlangsungan kehidupan generasi mendatang. Program ini akan dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan potensi dan sumber yang tersedia agar kebutuhan dari masyarakat Kelurahan Babakan Sari dapat terpenuhi.

b. Tujuan Umum dan Khusus

1) Tujuan Umum

Program yang direncanakan oleh praktikan memiliki tujuan untuk mengoptimalkan pemilahan sampah di Kelurahan Babakan Sari melalui peningkatan kapasitas. Sehingga bumi tetap lestari dan dapat melanjutkan keberlangsungannya hingga generasi berikutnya.

2) Tujuan Khusus

Tujuan dari pelaksanaan program ini secara lebih rincinya adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pemahaman warga masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah.
- b) Meningkatkan keterampilan warga masyarakat dalam pemanfaatan sampah rumah tangga yang kebermanfaatannya dapat langsung dirasakan.
- c) Membentuk kebiasaan baru warga masyarakat dalam hal pengelolaan sampah

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Dalam upaya penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pemilahan sampah yang belum optimal, disini praktikan merencanakan suatu program **“Pilah Pilih Pulih”**

- Bentuk kegiatan dari program ini sendiri yaitu
- 1) Sosialisasi pentingnya pemilahan sampah
 - 2) Pelatihan pemanfaatan sampah organik untuk bahan kebersihan rumah tangga

d. Sistem Partisipan

Berikut ini adalah partisipan dalam pelaksanaan program yang disusun oleh praktikan:

Tabel 2.11. Sistem Partisipan Profil Pemberdayaan Sosial

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	<i>Inisiator System</i> (pemrakarsa/ yang memiliki ide untuk membuat suatu program)	Pekerja Sosial
2.	<i>Change Agent System</i> (orang atau lembaga yang mengkoordinasikan usaha perubahan)	a. Pekerja Sosial b. Pengurus wilayah setempat c. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Bandung
3.	<i>Client System</i> (orang/lembaga yang menerima perubahan perilaku/menerima tujuan program)	Remaja usia 12-21 tahun di Kelurahan Babakan Sari
4.	<i>Support System</i> (orang/lembaga yang membantu terlaksananya program)	a. Pengurus wilayah setempat b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Bandung c. Karang Taruna d. LINMAS
5.	<i>Controlling System</i> (orang/lembaga yang mengontrol dan mengawasi jalannya program)	a. Pengurus wilayah setempat b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Bandung
6.	<i>Implementing System I</i> (orang/lembaga yang melaksanakan program)	a. Pekerja Sosial b. Pengurus wilayah setempat c. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Bandung d. Karang Taruna e. LINMAS f. Seluruh warga masyarakat yang belum memilah sampah di Kelurahan Babakan Sari
7.	<i>Target System</i> (orang/lembaga yang menjadi sasaran program)	Seluruh warga masyarakat yang belum memilah sampah di Kelurahan Babakan Sari
8.	<i>Action System</i> (orang/ lembaga yang bersama pekerja sosial berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas dan mencapai tujuan usaha perubahan)	a. Pengurus wilayah setempat b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Bandung c. Karang Taruna d. LINMAS

e. Metode dan Teknik

1) Metode

Metode yang digunakan untuk mengatasi masalah pemilahan sampah yang belum optimal di Kelurahan Babakan Sari, yaitu dengan menggunakan metode *Community Organization* dan *Community Development* (CO/CD). Pemilihan metode CO/CD dilakukan agar Seluruh warga masyarakat di Kelurahan Babakan Sari dapat mengartikulasikan masalah-masalahnya, kebutuhan-kebutuhannya, menelaah kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dimiliki, serta menganalisis kemungkinan-kemungkinan pemecahannya, dan mengorganisir kegiatan yang dilakukan.

Model yang digunakan disini adalah *Locality development*. *Locality development* adalah model pengembangan masyarakat yang dilakukan dengan partisipasi aktif berbagai lapisan masyarakat. Perhatian dalam model *locality development* adalah prosedur demokratis, permufakatan, serta kerja sama suka rela

2) Teknik

a) KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)

Melakukan KIE untuk merubah perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi secara lisan, tulisan, maupun peragaan kepada warga

b) *Capacity building*

Capacity building atau pembangunan kapasitas adalah suatu proses peningkatan kemampuan individu, kelompok, organisasi, atau suatu sistem sebagai usaha perubahan untuk mencapai tujuan diharapkan

f. Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

1) Rencana Anggaran Biaya

Dalam melaksanakan program kegiatan ini, pengeluaran biaya yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12. Rencana Anggaran Biaya Profil Pemberdayaan Sosial

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan					
1.	ATK	2	Paket	150.000	300.000
2.	Kain Putih	2	Meter	50.000	100.000
3.	Cat Kain	5	Buah	15.000	75.000
4.	Kuas	10	Buah	10.000	100.000
5.	Bahan pembuatan <i>eco-enzym</i> (Wadah, Gula Merah dan Air)	1	Buah	150.000	150.000
6.	Snack Narasumber	2	Dus	20.000	40.000
7.	Snack Panitia	15	Dus	15.000	225.000
8.	Snack Peserta	40	Dus	10.000	400.000
Sub Total Bahan					1.390.000
Honorarium					
1.	Narasumber (Pengajar/Widyaiswara)	2	OJ	500.000	1.000.000
Sub Total Honorarium					1.000.000
Transportasi					
1.	Transportasi Narasumber	2	OK	150.000	300.000
2.	Transportasi Panitia	15	OK	50.000	750.000
Sub Total Transportasi					1.050.000
TOTAL					3.440.000

2) Alat yang Dibutuhkan

Alat-alat yang dibutuhkan dalam program yang akan dijalankan, antara lain:

Tabel 2.13. Alat yang Dibutuhkan Profil Pemberdayaan Sosial

No	Daftar Alat Yang Dibutuhkan	Jumlah
1.	Speaker	2 buah
2.	Mikrofon	3 buah
3.	Meja Sedang	3 buah
4.	Contoh produk <i>eco-enzym</i>	5 buah
5.	Meja Besar	1 buah
6.	Kursi	40 buah
7.	LCD	1 buah
8.	Proyektor	1 buah
9.	Terminal/Kabel Roll	5 buah
10.	Laptop	1 buah
11.	Spanduk kreasi panitia	1 buah

g. Analisis Kelayakan Program

Tabel 2.14. Analisis Kelayakan Program Pemberdayaan Sosial

INTERNAL EKSTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Program merupakan inovasi baru di Kelurahan Babakan Sari 2. Alat dan bahan mudah ditemukan 3. Menghadirkan narasumber yang sesuai dengan target sasaran
PELUANG (O)	STRATEGI SO:	STRATEGI WO:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan dari pihak yang berkaitan dengan permasalahan 2. Karang taruna berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan 3. Penyediaan sarana dan prasarana bentuk dukungan dari pengurus wilayah setempat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersinergi dengan para <i>stakeholder</i> dalam pencapaian tujuan program 2. Mengoptimalkan potensi dan sumber untuk menyukseskan pelaksanaan program 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkreasi dengan <i>antimainstream</i> dalam penyusunan materi agar pesan tersampaikan 2. Memberikan pengertian bahwa dalam waktu singkat sudah dapat digunakan namun memang belum maksimal kebermanfaatannya
ANCAMAN (T)	STRATEGI ST:	STRATEGI WT:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebiasaan masyarakat yang sulit untuk berubah 2. Masyarakat bosan dengan sosialisasi yang berhubungan dengan sampah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengemas materi dengan menarik namun tetap berbobot. 2. Memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa kebiasaan buruk dapat menciptakan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memotivasi warga masyarakat untuk dapat merubah kebiasaannya 2. Menyelingi kegiatan dengan hiburan singkat agar tidak membosankan

Melihat hasil analisis kelayakan dari program yang akan dijalankan oleh praktikan menggunakan analisis SWOT dapat diketahui bahwa program ini memiliki kekuatan yang lebih banyak dari kelemahan serta peluang yang lebih besar dibandingkan dengan ancaman yang ada. Hal ini membuktikan bahwa program yang direncanakan layak untuk direalisasikan di Kelurahan Babakan Sari dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait pemberdayaan sosial.

Kemudian untuk mengukur berhasil atau tidaknya program yang akan dijalankan, disini praktikan menggunakan beberapa indikator keberhasilan yaitu antara lain sebagai berikut:

- 1) Indikator Proses
 - a) Peserta menyimak dengan seksama ketika sosialisasi.
 - b) Peserta aktif selama program berlangsung.
 - c) Semua rangkaian program yang dijalankan diikuti oleh peserta hingga selesai.
 - d) Peningkatan pengetahuan dari target sasaran setelah diberikan penyuluhan.
 - e) Peningkatan keterampilan dari target sasaran setelah diberikan pelatihan.
- 2) Indikator Hasil
 - a) Bertambahnya wawasan target sasaran mengenai pemilahan dan pemanfaatan sampah
 - b) Pemanfaatan sampah baik organik maupun anorganik dilakukan oleh seluruh rumah tangga di Kelurahan Babakan Sari
 - c) Berkurangnya volume sampah di TPST yang belum dipilah

h. Jadwal dan Langkah-langkah

1) Jadwal Kegiatan

Berikut di bawah ini adalah jadwal kegiatan dari program yang akan dilaksanakan:

Tabel 2.15. Jadwal Kegiatan Program Pemberdayaan Sosial

No	Waktu	Uraian Kegiatan	Partisipan	Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan
1.	06.30-07.30	Pengecekan perlengkapan yang akan digunakan	Seluruh Panitia	Divisi Logistik	Telah melaksanakan pengecekan sebelum acara dimulai
2.	07.30-07.45	Briefing Panitia	Seluruh Panitia	Ketua Pelaksana	Telah berkoordinasi sebelum acara dimulai
3.	07.45-08.00	Peserta mengisi absensi kehadiran	Peserta Kegiatan	Sekretaris	Semua audiens yang hadir telah didata melalui absensi
4.	08.00-08.15	<i>Pre- test</i>	Peserta kegiatan	Sekretaris	Mengetahui seberapa jauh pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah
5.	08.15-08.30	Pembukaan	a. Pengurus wilayah setempat b. Ketua Pelaksana	Divisi Acara	Dimulainya pelaksanaan program kegiatan
6.	SESI I 08.30-09.30	Penyampaian materi oleh narasumber	Peserta Kegiatan	a. Divisi Acara b. Divisi Dokumentasi	Masyarakat mampu memahami tentang pentingnya pemilahan sampah dan bagaimana pemanfaatan sampah menjadi bahan pembersih rumah tangga
	SESI II 09.30-10.30				
7.	10.30-10.45	<i>Post-test</i>	Peserta Kegiatan	Divisi Acara	Mengetahui seberapa pemahaman masyarakat terhadap materi yang disampaikan narasumber
8.	10.45-11.00	Penutupan	MC/Moderator	Divisi Acara	Seluruh rangkaian kegiatan terlaksana

2) Langkah-langkah

Langkah-langkah pelaksanaan program yang akan dijalankan penulis adalah sebagai berikut:

a) Tahap Persiapan

- (1) Membentuk kepanitiaan program
- (2) Membagi dan menjelaskan tugas pokok setiap divisi.

b) Tahap Perencanaan

- (1) Mengajukan usul mengenai rencana program yang akan dijalankan terhadap pengurus setempat yang berwenang sekaligus mengurus perizinan program dan tempat yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelangsungan program.
- (3) Memproduksi cairan *Eco-Enzym*
- (4) Membuat spanduk ramah lingkungan
- (5) Memperkenalkan kegiatan dengan cara mengadakan sosialisasi di setiap RT.
- (6) Melakukan penginputan data masyarakat yang akan mengikuti kegiatan dari setiap RT.

c) Tahap Pelaksanaan

Acara dilakukan selama satu hari dengan pembagian dua sesi. Dimana sesi pertama untuk peningkatan pengetahuan mengenai urgensi dari pemilahan sampah dan tahap kedua untuk kegiatan pelatihan pemanfaatan sampah untuk diolah menjadi produk pembersih rumah tangga yang dilakukan melalui penayangan video. Dalam melaksanakan program, diadakan *games* di sela-sela kegiatan agar partisipan terhindar dari kebosanan. Pemberian hadiah untuk pemenang *games* di akhir kegiatan sebagai bentuk apresiasi karena telah mengikuti kegiatan dengan *excited*.

d) Tahap Pengakhiran

- (1) Penutupan program oleh pengurus wilayah setempat dan Ketua Pelaksana Program.
- (2) Pengisian kuisioner kesan dan pesan dari peserta untuk program yang dijalankan.
- (3) Mengevaluasi program kegiatan.

D. Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial

1. Gambaran Umum Masalah

Lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia dan tidak bernyawa. Kemudian jika lingkungan sosial dapat diartikan sebagai wadah atau sarana individu untuk berinteraksi dengan lingkungannya dan membentuk sebuah pribadi serta memengaruhi tingkah laku seseorang. Antara lingkungan fisik dengan sosial ini harus berjalan selaras, sehingga tercipta lingkungan yang optimal atau dikenal sebagai *carrying capacity*. Pada kenyataan di kehidupan manusia saat ini, antara pemeliharaan lingkungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia terjadi ketimpangan, sehingga timbul berbagai masalah yang bersangkutan dengan penataan lingkungan sosial. Contoh nyata adalah permasalahan mengenai pengelolaan sampah yang ada di masyarakat.

Sampah merupakan permasalahan nyata yang dihadapi hampir di seluruh perkotaan Indonesia. Mengutip dari situs web Portal Bandung, Yana Mulyana selaku Wali Kota Bandung mengatakan bahwa “produksi sampah Kota Bandung mencapai 1.200 ton per hari.” Sebagian besar sampah di Kota Bandung bersumber dari permukiman dengan persentase mencapai 65,6% dari total rata-rata produksi sampah per harinya. Sisanya berasal dari pasar 18,8%, perkantoran 5,5%, daerah komersil 6%, fasilitas publik 2,8% dan lainnya 1,3%. Apabila sampah-sampah yang dihasilkan tidak dikelola dengan baik tentunya akan menjadi masalah yang besar. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Bandung mengembangkan strategi untuk mendorong pengelolaan sampah semakin baik lagi di lingkungan masyarakat Kota Bandung melalui beberapa program.

Pengelolaan sampah di kawasan Kota Bandung akhir-akhir ini dihadapkan dengan beberapa masalah yang cukup kompleks. Permasalahan yang terjadi antara lain laju timbunan sampah di TPS yang meningkat karena produksi sampah yang tinggi sedangkan TPA Sarimukti sedang terkendala sehingga mengakibatkan ritase berkurang. Kemudian rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik dan benar. Masalah selanjutnya adalah kepedulian mengenai kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan yang kurang sehingga acuh tak acuh dengan keberlanjutan lingkungan sekitarnya.

2. Tinjauan Konsep

a. Konsep Penataan Lingkungan Sosial

1) Definisi Lingkungan Sosial

Menurut Bintarto dan Surastopo dalam Sarah (2012), lingkungan sosial adalah tempat individu berinteraksi dan terdiri dari beragam aspek, seperti sikap kemasyarakatan, sikap kejiwaan, sikap kerohanian, dan lain sebagainya. Lingkungan sosial merupakan salah satu dari konsep ekosistem dalam ekologi. Pada ekologi akan berlangsung perpindahan material, energi dan

informasi dari sistem sosial yang dimuat dalam lingkungan sosial ke ekosistem sebagai konsekuensi dari aktivitas manusia yang berdampak pada ekosistem. Sistem sosial yang dimuat dalam lingkungan sosial terdiri dari pengetahuan, populasi, nilai, organisasi sosial, dan teknologi.

2) Definisi Penataan Lingkungan Sosial

Menurut Campbell (1983) dalam Mustafa Kamal Tarigan, penataan lingkungan sosial adalah tatanan hubungan sosial yang sangat dipengaruhi oleh konsep lingkungan hidup itu sendiri. Konsep lingkungan hidup mempunyai dua jenis, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Komponen dari lingkungan fisik ialah komponen abiotik dan komponen biotik, sedangkan komponen lingkungan sosial ialah organisasi sosial, modal sosial, kebijakan pembangunan, ekonomi, politik, dan hukum.

b. Konsep Sampah

1) Pengertian Sampah

Menurut World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra 2007). Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat (RI 2008).

Sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi bagi sebagian orang masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar (Nugroho 2013)

2) Jenis-jenis Sampah

Pengelolaan sampah berdasarkan jenis-jenis sampah berdasarkan pemilihannya dibagi menjadi tiga yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah bahan berbahaya dan beracun (B3) (Sucipto, 2012).

a) Sampah organik

Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai dan membusuk yaitu dari makhluk hidup, baik manusia, hewan dan tumbuhan. Sampah organik terbagi menjadi dua yaitu sampah organik basah dan sampah organik kering. Sampah yang mengandung air yang cukup tinggi seperti kulit buah dan sisa sayuran termasuk dalam sampah basah. Sampah kering merupakan sampah yang kandungan airnya sedikit seperti kayu, ranting pohon, dan daun kering.

b) Sampah anorganik

Sampah anorganik merupakan sampah yang sulit untuk membusuk dan sulit terurai. Sampah organik dapat digunakan kembali (*reuse*), yang dapat didaur ulang (*recycle*), dan yang tidak berasal dari makhluk hidup. Sampah anorganik berasal dari bahan yang terbuat dari plastik dan logam

c) Sampah B3

Sampah B3 merupakan sampah yang mengandung merkuri dan dikategorikan beracun serta berbahaya bagi manusia. Contoh dari sampah B3 yaitu kaleng bekas cat dan kaleng bekas minyak wangi. Sampah jenis ini biasanya merupakan sisa dari pengolahan bahan kimia yang berbahaya. Jenis sampah B3 sendiri meliputi:

(1) Sumber tidak spesifik: Limbah yang berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pelarutan kerak, mencuci, dan lain-lain.

(2) Sumber spesifik: Limbah yang berasal dari proses industri (kegiatan utama).

(3) Sumber lain: Limbah yang berasal dari sumber tak terduga seperti produk yang kadaluarsa, sisa kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

3) Sumber Sampah

Sumber sampah dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Suwerda, 2012):

a) Sampah rumah tangga

Terdapat beberapa jenis sampah yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga yaitu sampah organik seperti sisa makanan, sampah dari kebun/halaman dan sampah organik seperti bekas perlengkapan rumah tangga, gelas, kain, kardus, tas bekas dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat pula sampah rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti bahan kosmetik, batu baterai bekas yang sudah tidak terpakai.

b) Sampah pertanian

Kegiatan pertanian juga dapat menimbulkan sampah yang pada umumnya berupa sampah yang mudah membusuk seperti sampah organik (rerumputan, dan lain-lain). Selain sampah organik, kegiatan pertanian juga menghasilkan sampah berkategori B3 (bahan berbahaya dan beracun) seperti pestisida dan juga pupuk buatan. Kedua hal tersebut memerlukan penanganan yang tepat agar pada saat dilakukannya pengolahan tidak mencemari lingkungan maupun manusia.

c) Sampah sisa bangunan

Kegiatan pembuatan gedung maupun sesudahnya juga menghasilkan sampah selama ini seperti triplek, potongan kayu, dan bambu. Selain itu, sampah yang dihasilkan juga seperti kaleng bekas, potongan besi, potongan kaca, dan lain sebagainya.

d) Sampah perdagangan dan perkantoran

Sampah dari perdagangan biasanya berasal dari beberapa tempat yaitu pasar tradisional, warung, supermarket, pasar swalayan, mall. Karena berasal dari berbagai tempat makan, sampah yang dihasilkan pun berbagai jenis. Jenis

sampah yang ada di kegiatan perdagangan tersebut yaitu untuk anorganik terdapat kertas, kardus, plastik, kaleng, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk jenis organik yang menyumbang sampah lebih banyak terdapat sisa makanan dan dedaunan.

Sampah dari kegiatan perkantoran lebih banyak dihasilkan sampah jenis anorganik. Sampah tersebut seperti kertas bekas, alat tulis-menulis, kotak printer, tinta printer, toner printer, bahan kimia dari laboratorium, baterai, dan lain sebagainya.

e) Sampah industri

Segala hasil dari kegiatan di industri yang tidak digunakan kembali atau tidak dapat dimanfaatkan. Sampah dari kegiatan industri menghasilkan jenis sampah yang sesuai dengan bahan baku serta proses yang dilakukan. Sampah dapat diperoleh baik dari proses input, produksi maupun output.

4) Pengelolaan Sampah

Pengelolaan persampahan dapat terdiri dari beberapa aspek. SNI 3242-2008 tentang pengelolaan sampah di permukiman menjelaskan lima aspek sebagai persyaratan umum terkait pengelolaan limbah padat (sampah) yakni : hukum dan peraturan, kelembagaan/organisasi, teknis operasional, pembiayaan dan iuran atau retribusi, peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

a) Persyaratan hukum

Ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, ketertiban umum, kebersihan kota/lingkungan, pembentukan institusi/organisasi/retribusi dan perencanaan tata ruang kota serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

b) Persyaratan kelembagaan

Pengelola di permukiman harus berfokus pada peningkatan kinerja institusi pengelola sampah, dan perkuatan fungsi regulator dan operator. Sasaran yang harus dicapai adalah sistem dan institusi yang mampu sepenuhnya mengelola dan melayani persampahan di lingkungan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan dan retribusi atau iuran serta semaksimal mungkin melaksanakan konsep 3R di sumber.

c) Teknis operasional

Menerapkan sistem penanganan sampah setempat dengan :

- (1) Menerapkan pemilahan sampah organik dan non organik
- (2) Menerapkan teknik 3R di sumber dan TPS
- (3) Penanganan residu oleh pengelolaan sampah kota.

d) Pembiayaan

Memperhatikan peningkatan kapasitas pembiayaan untuk menjamin pelayanan dengan pemulihan biaya secara bertahap supaya sistem dan institusi, serta masyarakat dan dunia usaha punya kapasitas cukup untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas lingkungan untuk warga.

e) Aspek peran serta masyarakat

- (1) Melakukan pemilahan sampah sumber
- (2) Melakukan pengolahan sampah dengan konsep 3R
- (3) Berkewajiban membayar iuran/retribusi sampah
- (4) Mematuhi aturan pembuangan sampah yang ditetapkan.
- (5) Turut menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya
- (6) Berperan aktif dalam sosialisasi pengelolaan sampah lingkungannya.

3. Tinjauan Kritis

Lingkungan sosial adalah wadah dimana manusia dapat berinteraksi. Kemudian jika pentaan lingkungan sosial adalah tatanan hubungan sosial yang terbentuk dari interaksi antara lingkungan fisik dan sosial. Pada profil ini penataan lingkungan terfokus pada pengelolaan sampah, karena berhubungan langsung pada kehidupan sosial manusia. Selanjutnya konsep mengenai sampah, sampah adalah barang yang dibuang dan berasal dari kegiatan manusia. Jenis-jenis sampah disini ada sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Sumber asal produksi sampah sendiri ada lima yaitu sampah rumah tangga, sampah pertanian, sampah sisa bangunan, sampah perdagangan dan perkantoran, serta sampah industri. Pengelolaan sampah di permukiman memiliki lima syarat antara lain hukum dan peraturan, kelembagaan/organisasi, teknis operasional, pembiayaan dan iuran atau retribusi, dan yang terakhir adalah peran serta masyarakat.

4. Asesmen

a. Identifikasi Masalah

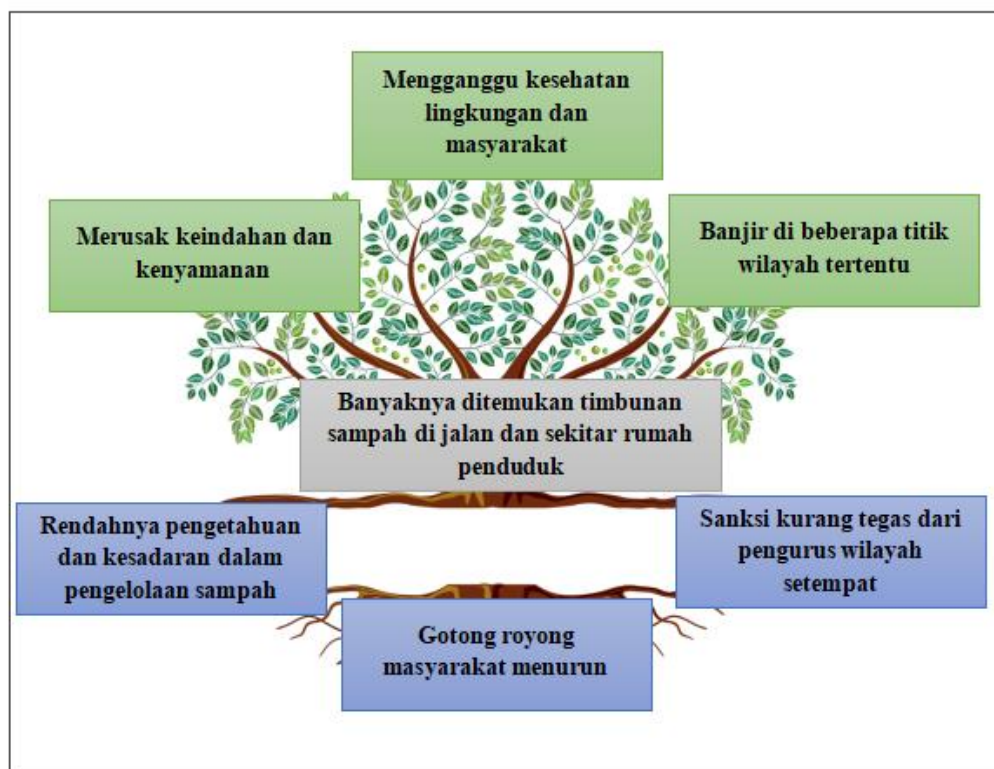
Masalah sampah merupakan hal yang krusial. Sampah juga dapat dikatakan sebagai masalah budaya karena dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan. Volume sampah yang kian meningkat namun tempat pembuangan sampah akhir (TPA) yang terbatas tentunya menjadi suatu persoalan jika tidak ditangani dengan seksama

Dalam undang-undang pengelolaan sampah disebutkan larangan bahwa, bagi setiap orang untuk tidak memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu dengan mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, membuang sampah tidak pada tempatnya serta tindakan lainnya yang dapat mencemarkan lingkungan. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai pengelolaan sampah,

tetap saja masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan sampah, bahkan ketika sudah mengetahui dampaknya tetap saja melakukan hal yang salah. Kesadaran masyarakat mengenai dampak besar yang ditimbulkan oleh sampah masih kurang

Berdasarkan hasil asesmen dan observasi di lapangan ditemukan beberapa masalah yang terjadi di Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong. Dimana diketahui bahwa terdapat masalah terkait penataan lingkungan yaitu banyak timbunan sampah di beberapa titik. Faktor pemicunya sendiri ada yang dari dalam diri warga masyarakat maupun faktor dari lingkungan. Hal ini menjadi sangat penting karena dengan adanya masalah tersebut dapat memicu permasalahan lain yang lebih serius.

Dalam menganalisis masalah terkait pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Babakan Sari, disini praktikan menggunakan teknologi pohon masalah. Pohon masalah merupakan teknologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebab dan akibat dari suatu masalah yang ada. Sehingga jika ditemukan sebab, akibat, beserta masalah utamanya akan lebih mudah dalam pemecahan masalah tersebut. Berikut merupakan hasil analisis masalah penataan lingkungan terkait banyaknya ditemukan timbunan sampah yang ada di pinggir jalan dan sekitar rumah penduduk di Kelurahan Babakan Sari menggunakan pohon masalah.



Gambar 2.4. Pohon Masalah Profil Penataan Lingkungan Sosial

1) Penyebab Masalah

- a) Rendahnya pengetahuan dan kesadaran dalam pengelolaan sampah

Warga masyarakat di Kelurahan Babakan Sari memiliki tingkat pengetahuan dalam pengelolaan sampah yang cukup rendah, hal ini dikarenakan edukasi mengenai hal tersebut tidak dilakukan secara terus menerus. Sosialisasi yang diberikan hanya diadakan beberapa kali dan bersifat tidak berkelanjutan. Kemudian warga masyarakat juga memiliki kesadaran yang rendah dalam hal pengelolaan sampah, sebagian dari mereka memiliki pengetahuan namun kenyataannya tidak dipraktikkan karena tetap saja membuang sampah di tempat yang bukan seharusnya. Mereka paham mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sampah namun tidak mau tahu akan hal tersebut.

- b) Gotong royong masyarakat menurun

Dengan adanya tenaga kebersihan di wilayah Kelurahan Babakan Sari membuat semangat gotong royong warga menurun. Hal ini dikarenakan mereka mengandalkan tenaga kebersihan tersebut dan tidak mau direpotkan lagi. Mereka merasa sudah mengeluarkan uang untuk membayar tenaga kebersihan maka itu adalah tugas dari tenaga kebersihan. Padahal pada kenyataannya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat adalah tanggung jawab bersama.

- c) Sanksi kurang tegas dari pengurus wilayah setempat

Ketika ditemukan ada warga masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, pengurus wilayah yang bertugas akan memberikan sanksi berupa himbauan untuk orang tersebut. Sanksi yang diberikan ini dinilai kurang tegas dan tidak menyelesaikan masalah karena tetap saja diulang di kemudian hari. Seharusnya sanksi yang diberikan dapat berupa denda atau hukuman yang bersifat memberi efek jera namun tetap bermanfaat. Pengurus wilayah setempat juga perlu memberikan teladan agar membentuk kesadaran dari warga masyarakat.

2) Dampak Masalah

- a) Merusak keindahan dan kenyamanan.

Timbunan sampah yang ada di pinggir jalan atau sekitar rumah warga tentu akan mengganggu kelangsungan hidup mereka. Mulai dari polusi visual karena keindahan sekitar tergantikan dengan tumpukan sampah dimana-mana. Kemudian juga terganggunya kenyamanan karena timbul bau tak sedap dari tumpukan sampah tersebut. Kawasan Kelurahan Babakan Sari merupakan padat penduduk, jika

ditambah dengan timbunan sampah yang ada maka keindahan dan kenyamanan sudah pasti rusak.

b) Mengganggu kesehatan lingkungan dan masyarakat

Timbunan sampah dapat menyebabkan polusi udara, karena selain menghasilkan bau busuk, sampah juga menghasilkan gas metana yang dapat mengikis lapisan ozon. Kemudian pencemaran tanah, tanah akan terkontaminasi oleh zat-zat beracun dari sampah ini sehingga hal ini tentunya akan beresiko bagi manusia.

c) Banjir di beberapa titik wilayah tertentu

Timbunan sampah yang ada, di beberapa titik menyumbat jalannya saluran air. Sampah-sampah ini membuat dangkal dan memenuhi selokan, jadi ketika terjadi hujan air akan meluap. Kondisi wilayah yang padat penduduk membuat tidak adanya daerah resapan air dan saluran air sempit, jadi apabila ada timbunan sampah maka akan memperparah banjir yang terjadi.

3) Fokus Masalah

Melihat dari hasil asesmen dapat diidentifikasi fokus masalah yang serius dan harus segera diselesaikan di Kelurahan Babakan Sari adalah mengenai ditemukan banyaknya timbunan sampah di jalan dan sekitar rumah penduduk. Permasalahan ini berdampak besar pada kehidupan warga masyarakat, maka dari itu perlu diprioritaskan agar cepat selesai. Dengan adanya sampah yang ditimbun di sembarang tempat akan menimbulkan masalah-masalah lain seperti terganggunya kesehatan dan kenyamanan. Selain itu juga timbunan sampah ini memicu terjadinya banjir di beberapa wilayah tertentu.

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan fokus masalah yang terdapat di Kelurahan Babakan Sari mengenai penataan lingkungan yang dimana ditemukan banyak timbunan sampah di beberapa tempat, dapat diidentifikasi bahwa kebutuhan warga masyarakat adalah pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan sampah bagi kehidupan. Sehubungan dengan hal tersebut maka warga masyarakat memerlukan penyuluhan sosial mengenai pentingnya mengelola sampah dengan baik dan benar. Selain itu juga diperlukan pengadaan tong sampah di beberapa titik wilayah yang sering dijadikan tempat pembuangan. Dengan demikian akan menciptakan kenyamanan dan keindahan di wilayah Kelurahan Babakan Sari.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Potensi dan sumber yang dimiliki Kelurahan Babakan Sari dan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan yaitu antara lain:

1) Pengurus wilayah setempat

Pengurus wilayah memiliki tugas yaitu memberikan pelayanan masyarakat, memaksimalkan peran serta

masyarakat, menjadi sarana penghubung antara masyarakat dengan pemerintah tingkat atas. Dengan adanya pengurus wilayah setempat pada program ini nantinya akan berperan mendukung pelaksanaan program yang ada dengan mendorong masyarakat untuk andil dan berperan aktif serta sebagai pengawas dari jalannya program.

2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DLHK memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di bagian persampahan dan air limbah. Dengan adanya DLHK di Kelurahan Babakan Sari dapat menjadi pihak yang memberi edukasi kepada masyarakat sekaligus mengontrol pengelolaan lingkungan. Ketika pelaksanaan program nantinya DLHK bertugas memfasilitasi dan memonitoring jalannya program karena berhubungan dengan keberlanjutan lingkungan.

3) Karang Taruna

Karang taruna sebagai kepanjangan tangan dari pihak Kelurahan bertugas membantu mencegah pemicu masalah-masalah yang akan timbul dan menimbulkan kerentanan sosial. Karang taruna adalah suatu organisasi kaum muda dimana selain sebagai wadah pengumpulan aspirasi mereka, namun juga pengembangan potensinya. Peran dari karang taruna di pelaksanaan program ini adalah membantu mensukseskan dengan ikut berpartisipasi di kepanitiaan karena kaum muda akan lebih dipercaya oleh warga masyarakat.

4) Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

LINMAS adalah adalah satuan perlindungan yang bertugas untuk ikut serta memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta membantu kegiatan sosial masyarakat. Adanya LINMAS di Kelurahan Babakan Sari dapat berperan sebagai tim keamanan pada program yang bertugas menjaga kegiatan agar tetap kondusif sesuai dengan tujuan awal.

5. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Pada umumnya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat meliputi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi pupuk tanaman. Tetapi apabila sampah tidak dikelola dengan benar akan memicu timbulnya penyakit, selain itu juga akan timbul bau yang kurang sedap akibat dari hasil pembusukan sampah organik yang cepat. Selanjutnya, sampah anorganik juga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi apabila sampah

anorganik ini tidak dikelola dengan tepat dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai.

Saat sampah organik dan anorganik tercampur, maka dapat menyebabkan sulit terurainya sampah organik dan hilangnya nilai ekonomis dari sampah anorganik itu sendiri. Apabila keadaan tersebut berlangsung terus menerus maka akan mengakibatkan sampah menumpuk di tempat penampungan sampah. Selain itu juga apabila tidak dikelola dengan baik, maka dapat memperburuk kondisi lingkungan di sekitarnya. Yaitu, menjadi sumber bau yang tidak sedap sehingga kemudian dapat menjadi bibit penyakit.

Berdasarkan hasil asesmen dan observasi di lapangan, dapat diidentifikasi permasalahan terkait penataan lingkungan yaitu ditemukannya timbunan sampah di beberapa tempat. Faktor yang menjadi penyebab adanya masalah ini adalah rendahnya pengetahuan dan kesadaran warga masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Kemudian selain itu juga warga masyarakat berkurang rasa kegotong-royongannya karena adanya tenaga kebersihan. Hal ini jika tidak segera ditangani dapat menimbulkan masalah-masalah yang lebih serius yang menyangkut pada kehidupan manusia.

Melihat dari fokus masalah yang diangkat oleh praktikan, maka diperlukan adanya program yang memberikan edukasi kepada warga masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Jika pengetahuan dan keterampilan warga masyarakat meningkat maka akan mengurangi populasi sampah yang ada di jalan atau sekitar rumah penduduk. Dengan demikian maka akan tercipta lingkungan yang bersih, sehat, rapi, dan indah. Rencana program ini disusun dengan memanfaatkan potensi dan sumber yang ada di Kelurahan Babakan Sari sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.

b. Tujuan Umum dan Khusus

1) Tujuan Umum

Program yang direncanakan oleh praktikan memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas warga masyarakat dalam hal pengelolaan sampah serta menyadarkan mereka agar membuang sampah pada tempat yang telah disediakan sehingga tidak ada lagi timbunan di jalan dan sekitar rumah warga.

2) Tujuan Khusus

Secara spesifik tujuan dari dilaksanakannya program ini adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga masyarakat mengenai pengelolaan sampah
- b) Meningkatkan kesadaran warga masyarakat untuk tidak membuang sampah dengan cara menimbun di sembarang tempat

c) Menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan sehat.

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Sebagai upaya penyelesaian mengenai timbunan sampah yang ada di jalan dan sekitar rumah penduduk, disini praktikan merencanakan suatu program **“Kelola Aku, Selamatkan Semua”**

Bentuk kegiatan dari program ini sendiri yaitu

- 1) Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar
- 2) Penyediaan tong sampah di beberapa titik yang sering dijadikan pembuangan.

d. Sistem Partisipan

Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program yaitu antara lain:

Tabel 2.16. Sistem Partisipan Profil Penataan Lingkungan Sosial

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	<i>Inisiator System</i> (pemrakarsa/ yang memiliki ide untuk membuat suatu program)	Pekerja Sosial
2.	<i>Change Agent System</i> (orang atau lembaga yang mengkoordinasikan usaha perubahan)	a. Pekerja Sosial b. Pengurus wilayah setempat c. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Bandung
3.	<i>Client System</i> (orang/lembaga yang menerima perubahan perilaku/menerima tujuan program)	Warga masyarakat yang sering membuang timbunan sampah di jalan atau tempat yang bukan seharusnya
4.	<i>Support System</i> (orang/lembaga yang membantu terlaksananya program)	a. Pengurus wilayah setempat b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Bandung c. Karang Taruna d. LINMAS
5.	<i>Controlling System</i> (orang/lembaga yang mengontrol dan mengawasi jalannya program)	a. Pengurus wilayah setempat b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Bandung
6.	<i>Implementing System I</i> (orang/lembaga yang melaksanakan program)	a. Pekerja Sosial b. Pengurus wilayah setempat c. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Bandung d. Karang Taruna e. LINMAS f. Seluruh warga masyarakat di Kelurahan Babakan Sari
7.	<i>Target System</i> (orang/lembaga yang menjadi sasaran program)	Seluruh warga masyarakat di Kelurahan Babakan Sari
8.	<i>Action System</i> (orang/ lembaga yang bersama pekerja sosial berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas dan mencapai tujuan usaha perubahan)	a. Pengurus wilayah setempat b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Bandung c. Karang Taruna d. LINMAS

e. Metode dan Teknik

1) Metode

Metode yang digunakan untuk mengatasi masalah pemilahan sampah yang belum optimal di Kelurahan Babakan Sari, yaitu dengan menggunakan metode *Community Organization* dan *Community Development* (CO/CD). Pemilihan metode CO/CD dilakukan agar Seluruh warga masyarakat di Kelurahan Babakan Sari dapat mengartikulasikan masalah-masalahnya, kebutuhan-kebutuhannya, menelaah kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dimiliki, serta menganalisis kemungkinan-kemungkinan pemecahannya, dan mengorganisir kegiatan yang dilakukan.

Model yang digunakan disini adalah *Locality development*. *Locality development* adalah model pengembangan masyarakat yang dilakukan dengan partisipasi aktif berbagai lapisan masyarakat. Perhatian dalam model *locality development* adalah prosedur demokratis, permufakatan, serta kerja sama suka rela

2) Teknik

- a) Penyuluhan sosial merupakan seperangkat proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi kepada kelompok sasaran, sehingga muncul pemahaman yang satu visi, perolehan pengetahuan, dan keinginan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
- b) *Capacity building* atau pembangunan kapasitas adalah suatu proses peningkatan kemampuan individu, kelompok, organisasi, atau suatu sistem sebagai usaha perubahan untuk mencapai tujuan diharapkan

f. Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

1) Rencana Anggaran Biaya

Dalam melaksanakan program kegiatan ini, pengeluaran biaya yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17. RAB Profil Penataan Lingkungan Sosial

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan					
1.	ATK	2	Paket	150.000	300.000
2.	Kain Putih	2	Meter	50.000	100.000
3.	Cat Kain	5	Buah	15.000	75.000
4.	Kuas	10	Buah	10.000	100.000
5.	Tong Sampah	20	Buah	100.000	2.000.000
6.	<i>Snack</i> Narasumber	1	Dus	20.000	20.000
7.	<i>Snack</i> Panitia	10	Dus	15.000	150.000
8.	<i>Snack</i> Peserta	30	Dus	10.000	300.000
Sub Total Bahan					3.045.000
Honorarium					
1.	Narasumber (Pengajar/Widyaiswara)	1	OJ	500.000	500.000
Sub Total Honorarium					500.000
Transportasi					
1.	Transportasi Narasumber	1	OK	150.000	150.000
2.	Transportasi Panitia	10	OK	50.000	500.000
Sub Total Transportasi					650.000
TOTAL					4.195.000

2) Alat yang Dibutuhkan

Alat-alat yang dibutuhkan dalam program yang akan dijalankan, antara lain:

Tabel 2.18. Alat yang Dibutuhkan Profil Penataan Lingkungan Sosial

No	Daftar Alat Yang Dibutuhkan	Jumlah
1.	Speaker	2 buah
2.	Mikrofon	2 buah
3.	Meja Sedang	4 buah
4.	Tong Sampah	20 buah
5.	Kursi	40 buah
6.	LCD	1 buah
7.	Proyektor	1 buah
8.	Terminal/Kabel Roll	5 buah
9.	Laptop	1 buah
10.	Spanduk kreasi panitia	1 buah

g. Analisis Kelayakan Program

Tabel 2.19. Analisis Kelayakan Program Penataan Lingkungan Sosial

INTERNAL EKSTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salah satu alternatif solusi atas permasalahan yang ada karena menyesuaikan dengan kebutuhan 2. Dapat menjadi media pembelajaran di semua kalangan 	Sarana dan prasarana sepenuhnya belum menunjang
PELUANG (O)	STRATEGI SO:	STRATEGI WO:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapat dukungan penuh dari para <i>stakeholder</i> 2. Karang taruna ikut terlibat aktif dalam kepanitiaan program 3. Sarana dan prasarana mudah ditemukan di Kelurahan Babakan Sari 	Bekerja mengupayakan terciptanya lingkungan yang bersih, rapi, sehat, dan indah.	Melakukan kerja sama dengan <i>stakeholder</i> untuk pengadaan sarana dan prasarana pengolahan sampah
ANCAMAN (T)	STRATEGI ST:	STRATEGI WT:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi sampah yang semakin tinggi 2. Banyak masyarakat yang acuh tak acuh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan materi yang informatif agar dapat diterima dengan cepat 2. Memberi motivasi masyarakat untuk ikut serta menekan laju perkembangan sampah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan lingkungannya 2. Memberikan sanksi tegas agar menimbulkan efek jera

Melihat hasil analisis kelayakan dari program yang akan dijalankan oleh praktikan menggunakan analisis SWOT dapat diketahui bahwa program ini memiliki kekuatan yang lebih banyak dari kelemahan serta peluang yang lebih besar dibandingkan dengan ancaman yang ada. Hal ini membuktikan bahwa program yang direncanakan layak untuk direalisasikan di Kelurahan Babakan Sari dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penataan lingkungan sosial.

Kemudian untuk mengukur berhasil atau tidaknya program yang akan dijalankan, disini praktikan menggunakan beberapa indikator keberhasilan yaitu antara lain sebagai berikut:

- 1) Indikator Proses
 - a) Peserta menyimak dengan seksama ketika sosialisasi.
 - b) Peserta aktif selama program berlangsung.
 - c) Semua rangkaian program yang dijalankan diikuti oleh peserta hingga selesai.
 - d) Peningkatan pengetahuan dari target sasaran setelah diberikan penyuluhan.
- 2) Indikator Hasil
 - a) Bertambahnya wawasan target sasaran mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar
 - b) Berkurangnya timbunan sampah di beberapa titik lokasi Kelurahan Babakan Sari
 - c) Terciptanya lingkungan Kelurahan Babakan Sari yang bersih, sehat, rapi, dan indah

h. Jadwal dan Langkah-langkah

1) Jadwal Kegiatan

Tabel 2.20. Jadwal Kegiatan Program Penataan Lingkungan Sosial

No	Waktu	Uraian Kegiatan	Partisipan	Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan
1.	06.30-07.30	Pengecekan perlengkapan yang akan digunakan	Seluruh Panitia	Divisi Logistik	Telah melaksanakan pengecekan sebelum acara dimulai
2.	07.30-07.45	Briefing Panitia	Seluruh Panitia	Ketua Pelaksana	Telah berkoordinasi sebelum acara dimulai
3.	07.45-08.00	Peserta mengisi absensi kehadiran	Peserta Kegiatan	Sekretaris	Semua audiens yang hadir telah didata melalui absensi
4.	08.00-08.15	<i>Pre- test</i>	Peserta kegiatan	Sekretaris	Mengetahui seberapa jauh pengetahuan audiens tentang pentingnya pengelolaan sampah
5.	08.15-08.30	Pembukaan	a. Pengurus wilayah setempat b. Ketua Pelaksana	Divisi Acara	Dimulainya pelaksanaan program kegiatan
6.	08.30-09.30	Penyampaian materi oleh narasumber	Peserta Kegiatan	a. Divisi Acara b. Divisi PDD	Audiens mampu memahami tentang pentingnya pengelolaan sampah dan dampak yang timbul dari menimbun sampah
7.	09.30-09.45	<i>Post-test</i>	Peserta Kegiatan	Divisi Acara	Mengetahui seberapa pemahaman audiens terhadap materi yang disampaikan narasumber
8.	09.45-10.00	Penutupan	MC/Moderator	Divisi Acara	Seluruh rangkaian kegiatan terlaksana
9.	10.00-12.00	Penempatan tong sampah di beberapa titik	Panitia dan Peserta Kegiatan	Divisi Acara	Tong sampah telah tersedia di titik yang sering digunakan untuk menimbun sampah

2) Langkah-langkah Program

Langkah-langkah pelaksanaan program yang akan dijalankan penulis adalah sebagai berikut:

a) Tahap Persiapan

- (1) Membentuk kepanitiaan program
- (2) Membagi dan menjelaskan tugas pokok setiap divisi.

b) Tahap Perencanaan

- (1) Mengajukan usul mengenai rencana program yang akan dijalankan terhadap pengurus setempat yang berwenang sekaligus mengurus perizinan program dan tempat yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelangsungan program.
- (3) Membuat spanduk ramah lingkungan
- (4) Memperkenalkan kegiatan dengan cara mengadakan sosialisasi di setiap RT.
- (5) Melakukan penginputan data masyarakat yang akan mengikuti kegiatan dari setiap RT.

c) Tahap Pelaksanaan

Acara dilakukan selama satu hari dengan pembagian dua sesi. Dimana sesi pertama untuk peningkatan pengetahuan serta keterampilan dalam pengelolaan sampah khususnya penataan lingkungan dengan tidak menimbun sampah di sembarang tempat dan tahap kedua untuk kegiatan penempatan tong sampah di beberapa titik yang sering digunakan untuk membuang sampah. Dalam melaksanakan program, diadakan *games* di sela-sela kegiatan agar partisipan terhindar dari kebosanan. Pemberian hadiah untuk pemenang *games* di akhir kegiatan sebagai bentuk apresiasi karena telah mengikuti kegiatan dengan *excited*.

d) Tahap Pengakhiran

- (1) Penutupan program oleh pengurus wilayah setempat dan Ketua Pelaksana Program.
- (2) Pengisian kuisioner kesan dan pesan dari peserta untuk program yang dijalankan.
- (3) Mengevaluasi program kegiatan.

E. Profil Analisis Penanggulangan Bencana

1. Gambaran Umum Masalah

Bencana yang ada di Indonesia telah banyak terjadi seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir, angin topan, dan tanah longsor. Faktor utama yang dapat mengakibatkan bencana tersebut menimbulkan korban dan kerugian besar, yaitu kurangnya pemahaman tentang karakteristik bahaya, sikap, atau perilaku yang mengakibatkan penurunan sumber daya alam, kurangnya informasi peringatan dini yang mengakibatkan ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dan ketidaksiapan dalam menghadapi bencana (Bakornas, 2007).

Kesiapsiagaan lebih ditekankan pada usaha menyiapkan kemampuan untuk melakukan kegiatan tanggap darurat dengan cepat dan akurat kaitannya dengan upaya penanggulangan bencana di Indonesia, sekolah sebagai ruang publik memiliki peran nyata dalam membangun ketahanan masyarakat. Kesiapsiagaan sekolah dimaksudkan agar komunitas sekolah tahu, paham, dan peduli terhadap alam sekitar juga meningkatkan keterampilan untuk mengurangi resiko apabila terjadi bencana (Pratiwi, 2016).

Namun pada kenyataan tingkat kesiapsiagaan anak usia sekolah di Indonesia saat ini masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pengupayaan kesiapsiagaan bencana di sekolah menjadi agenda penting bersama yang merupakan upaya dan tanggung jawab dari warga sekolah dan para pemangku kepentingan sekolah. Dampak yang akan terjadi jika kesiapsiagaan rendah yaitu menimbulkan lebih parahnya dampak bencana banjir seperti tingginya korban jiwa, luka berat, banyaknya korban yang mengungsi dan timbul penyakit dari kondisi lingkungan yang rusak.

2. Tinjauan Konsep

a. Konsep Bencana

1) Definisi Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2) Jenis-jenis Bencana

Berdasarkan faktor penyebabnya, bencana dibagi menjadi tiga yaitu:

a) Bencana alam

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

b) Bencana non alam

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

c) Bencana sosial

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

b. Konsep Penanggulangan Bencana

1) Definisi Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

a) Kegiatan pencegahan bencana

Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. Kegiatan ini meliputi:

(1) Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

(2) Peringatan dini

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

(3) Mitigasi

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

b) Tanggap darurat

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

c) Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran

utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

2) Tujuan Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b) menelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c) menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d) menghargai budaya lokal;
- e) membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f) mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g) menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

c. Konsep Anak Terlantar

1) Definisi anak terlantar

Anak terlantar sendiri pada umumnya merupakan anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Ada yang berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga mereka tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan jalanan yang akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif. Bahkan yang lebih miris lagi adalah ada anak terlantar yang tidak memiliki sama sekali keluarga (hidup sebatang kara). (Sukadi, 2013)

2) Ciri-ciri anak terlantar

Ciri ciri atau karakteristik anak terlantar diuraikan dalam Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 Tahun 1984 yaitu:

- a) Anak (Laki-laki/perempuan) usia 5-18 tahun;
- b) Tidak memiliki ayah, karena meninggal (yatim), atau ibu karena meninggal (piatu) tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar, atau melanjutkan pelajaran pada pendidikan dasar;
- c) Orangtua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap. Penghasilan tidak tetap dan sangat kecil serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya;
- d) Orangtua yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap baik itu rumah sendiri maupun rumah sewaan;
- e) Tidak memiliki ibu dan bapak (yatim piatu), dan saudara, serta belum ada orang lain yang menjamin

kelangsungan pendidikan pada tingkatan dasar dalam kehidupan anak;

- f) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya; dan
- g) Anak yang lahir karena tindak perkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan.

3) Hak-hak anak terlantar

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur mengenai hak-hak anak yang terdapat dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan kembang dengan wajar;
- b) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna;
- c) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- d) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

3. Tinjauan Kritis

Bencana adalah peristiwa yang mengganggu kehidupan manusia dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian lainnya. Bencana jenisnya ada tiga jika berdasar faktor penyebabnya, yaitu bencana alam, non alam, dan sosial. Selanjutnya konsep penanggulangan bencana, penanggulangan bencana sendiri adalah serangkaian upaya penanganan bencana dari mulai penetapan kebijakan, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, hingga rehabilitasi. Penanggulangan bencana memiliki tujuan yaitu memberikan perlindungan, menyelaraskan peraturan, menjamin terselenggaranya program, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan, serta menciptakan perdamaian. Pada profil ini penanggulangan bencana akan terfokus dengan sasaran anak terlantar. Anak terlantar adalah anak yang memiliki latar belakang berbeda dengan yang lain. Anak terlantar memiliki hak sama seperti anak-anak di luar sana yaitu antara lain hak atas kesejahteraan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan, serta perlindungan atas lingkungan hidup yang membahayakan.

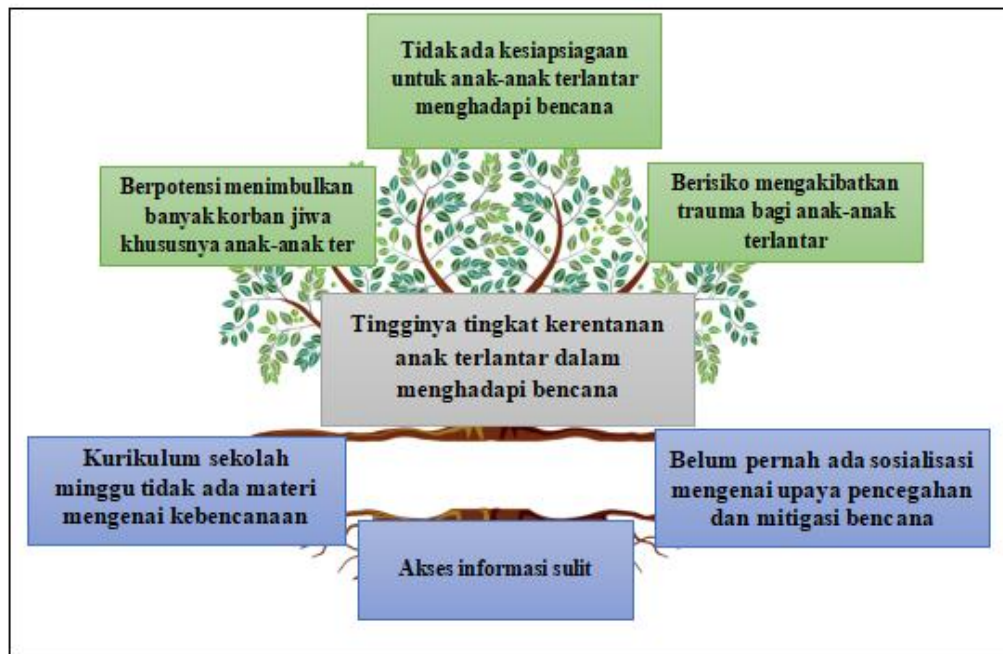
4. Asesmen

a. Identifikasi Masalah

Kesiapsiagaan merupakan salah satu bagian dari proses manajemen bencana dan didalam konsep bencana yang berkembang saat ini, pentingnya kesiapsiagaan merupakan salah satu elemen penting dari kegiatan pencegahan, pengurangan risiko bencana yang bersifat pro-aktif, sebelum terjadinya suatu bencana (LIPI-UNESCO, 2006). Secara umum, faktor utama banyaknya korban jiwa, kerusakan, dan kerugian yang timbul akibat bencana adalah masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pelaku pengelola sumber daya hayati dan lingkungan terhadap risiko bencana di wilayahnya. Selain itu, dukungan mitigasi struktural yang belum memadai juga menjadi faktor tak terpisahkan. Hal ini mengakibatkan kesadaran, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masih sangat kurang.

Dari hasil wawancara dan observasi di Kelurahan Babakan Sari ditemukan bahwa terdapat beberapa permasalahan tingkat kerentanan anak terlantar dalam menghadapi potensi terjadinya bencana. Permasalahan ini menjadi sangat penting karena memberikan dampak yang serius bahkan menyangkut dengan nyawa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut baik dari yang berasal dari dalam diri (internal) maupun dari luar (eksternal).

Praktikan disini melakukan analisis masalah kerentanan anak terlantar dalam menghadapi bencana di Kelurahan Babakan Sari melalui pohon masalah. Pohon masalah merupakan suatu teknik untuk menggambarkan rangkaian hubungan sebab akibat serta beberapa faktor yang saling terkait. Pohon masalah biasanya digunakan pada tahap perencanaan. Berikut hasil analisis pohon sebab akibat masalah kesiapsiagaan anak terlantar dalam menghadapi bencana yang terdapat di Kelurahan Babakan Sari.



Gambar 2.5. Pohon Masalah Profil Penanggulangan Bencana

1) Penyebab Masalah

- a) Belum pernah ada sosialisasi mengenai upaya pencegahan dan mitigasi bencana

Selama ini belum ada pihak manapun yang memberikan sosialisasi mengenai upaya pencegahan dan mitigasi bencana. Hal ini dikarenakan sasaran dari program mereka hanya sekolah-sekolah formal, bahkan terkadang sekolah formal pun belum tentu mendapatkan sosialisasi. Sekolah minggu dapat dikatakan sedikit yang melirik untuk mengadakan suatu penyuluhan karena siswanya yang tidak sebanyak sekolah formal dan dianggap kurang bermanfaat. Padahal pada kenyataannya walaupun jumlah sedikit mereka juga berhak untuk mendapatkan edukasi dari pihak luar khususnya upaya pencegahan dan mitigasi bencana.

- b) Kurikulum sekolah minggu tidak ada materi mengenai kebencanaan

Di sekolah minggu, anak terlantar hanya mendapatkan mata pelajaran matematika dan agama. Jadi dapat dilihat bahwa dalam kurikulum mereka tidak ada tambahan lain termasuk mengenai kebencanaan. Mereka hanya difokuskan agar dapat menghitung seperti anak-anak lain dan memiliki akhlak yang baik. Materi mengenai kebencanaan belum ada karena dianggap kurang penting karena pihak pengajar berpikir bahwa lokasi tempat tinggal mereka itu sudah aman dari bencana.

- c) Akses terhadap informasi sulit

Karena mereka termasuk golongan kelompok rentan,

maka dalam mengakses informasi pun juga sulit. Hal ini dikarenakan mereka yang tidak paham mengenai penggunaan teknologi dan tidak mengikuti perkembangannya sehingga serba tertinggal. Padahal di masa sekarang semua informasi dapat dicari dengan mudah termasuk mengenai kebencanaan. Ditambah lagi kurangnya minat pihak luar untuk sekadar berbagi informasi di sekolah minggu ini membuat mereka semakin rentan.

2) Dampak Masalah

- a) Tidak ada kesiapsiagaan anak-anak terlantar untuk menghadapi bencana

Akibat dari tidak adanya transfer ilmu mengenai kebencanaan membuat anak-anak terlantar tidak memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Hal ini dikarenakan mereka yang terbatas akses informasi terhadap hal-hal yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan mitigasi bencana. Selain itu juga anak-anak terlantar di sekolah minggu sedikit berinteraksi dengan pihak luar. Tidak adanya kesiapsiagaan dari anak-anak terlantar ini merupakan dampak masalah yang cukup serius.

- b) Berpotensi banyak korban jiwa ketika terjadi bencana khususnya anak-anak terlantar

Ketika terjadi suatu bencana di wilayah Kelurahan Babakan Sari, akan berpotensi menimbulkan banyak korban jiwa anak-anak. Hal ini dikarenakan mereka yang tidak memiliki pengetahuan mengenai kebencanaan tidak tahu harus melakukan apa ketika bencana menimpanya. Mereka hanya bisa panik sehingga tidak dapat berpikir jernih untuk menyelamatkan diri. Akibatnya banyak korban jiwa anak-anak berjatuh karena mereka tidak pernah mendapatkan informasi mengenai prosedur penyelamatan diri ketika bencana.

- c) Berisiko mengakibatkan trauma bagi anak-anak terlantar setelah terjadi bencana

Setelah terjadi suatu bencana, anak-anak memiliki risiko yang tinggi trauma terhadap peristiwa tersebut. Hal ini dikarenakan hakikatnya anak adalah kelompok rentan yang mudah terguncang jiwanya ketika terjadi suatu bencana. Bagi mereka bencana adalah suatu peristiwa besar yang meninggalkan bekas trauma mendalam kepadanya. Trauma ini nantinya akan membuat kehidupan bersosial mereka semakin terganggu.

3) Fokus Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan penanggulangan bencana di Kelurahan Babakan Sari, diperoleh fokus masalah yang sesuai yaitu mengenai tingginya tingkat kerentanan anak terlantar di Kelurahan Babakan Sari terhadap risiko bencana. Fokus masalah ini diangkat sebagai topik

penelitian karena dianggap sangat serius mengingat anak adalah kelompok rentan. Fokus masalah ini dijadikan prioritas karena harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk seperti kematian anak karena bencana.

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan prioritas masalah yang ada di Kelurahan Babakan Sari dalam penanggulangan bencana, dapat diidentifikasi adanya kebutuhan anak-anak terlantar yaitu perihal pengetahuan dan keterampilan dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana. Anak-anak terlantar juga memerlukan akses informasi yang tepat dan terpercaya seputar bencana. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka anak-anak terlantar di Kelurahan Babakan Sari membutuhkan adanya peningkatan kapasitas berupa pelatihan dalam kesiapsiagaan bencana. Serta advokasi sosial untuk memasukkan materi kebencanaan di kurikulum sekolah minggu.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Potensi dan sumber yang dimiliki Kelurahan Babakan Sari dan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan yaitu antara lain:

1) Pengurus wilayah setempat

Pengurus wilayah memiliki tugas yaitu memberikan pelayanan masyarakat, memaksimalkan peran serta masyarakat, menjadi sarana penghubung antara masyarakat dengan pemerintah tingkat atas. Dengan adanya pengurus wilayah setempat pada program ini nantinya akan berperan mendukung pelaksanaan program yang ada dengan mendorong masyarakat untuk andil dan berperan aktif serta sebagai pengawas dari jalannya program.

2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BPBD Jawa Barat memiliki fungsi yaitu penyelenggaraan perumusan, penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi. Selain itu juga sebagai pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Dengan adanya BPBD di pelaksanaan program yang direncanakan, nantinya akan berkolaborasi bersama dengan sistem partisipan yang lain untuk mensukseskan berjalannya program. BPBD disini juga berperan untuk mengawasi jalannya program.

3) Karang Taruna

Karang taruna sebagai kepanjangan tangan dari pihak Kelurahan bertugas membantu mencegah pemicu masalah-masalah yang akan timbul dan menimbulkan kerentanan sosial. Karang taruna adalah suatu organisasi kaum muda dimana selain sebagai wadah pengumpulan aspirasi mereka, namun juga pengembangan potensinya. Peran dari karang taruna di pelaksanaan program ini adalah membantu

mensukseskan dengan ikut berpartisipasi di kepanitiaan karena kaum muda akan lebih dipercaya oleh warga masyarakat

4) Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

LINMAS adalah adalah satuan perlindungan yang bertugas untuk ikut serta memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta membantu kegiatan sosial masyarakat. Adanya LINMAS di Kelurahan Babakan Sari dapat berperan sebagai tim keamanan pada program yang bertugas menjaga kegiatan agar tetap kondusif sesuai dengan tujuan awal.

5. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Bencana merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat dihindari oleh siapapun termasuk anak-anak. Maka dari itu diperlukan adanya upaya pencegahan risiko bencana untuk mengurangi korban jiwa dan kerugian lainnya akibat dari bencana. Upaya ini seharusnya diberikan kepada semua lapisan masyarakat. Namun pada kenyataannya pemberian edukasi belum sampai dirasakan oleh anak-anak terlantar karena mereka tidak duduk di bangku sekolah formal dan jarang yang memberi perhatian kepada mereka.

Dapat diidentifikasi permasalahan terkait penanggulangan bencana di Kelurahan Babakan Sari berdasarkan hasil asesmen dan observasi di lapangan, yaitu mengenai tingkat kerentanan anak terlantar yang tinggi dalam menghadapi bencana. Faktor pemicunya sendiri adalah karena mereka terbatas akses informasi dan sedikit pihak yang memberikan perhatian kepada mereka.

Melihat dari fokus permasalahan yang menjadi prioritas, maka diperlukan adanya suatu program yang meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kesiapsiagaan khususnya anak-anak terlantar yang kurang mendapatkan perhatian. Dalam program ini nantinya juga akan ada upaya advokasi penambahan materi kebencanaan ke dalam kurikulum sekolah minggu. Dengan demikian maka akan tercipta anak-anak yang tangguh dalam menghadapi bencana. Rencana program ini disusun dengan memanfaatkan potensi dan sumber yang ada di Kelurahan Babakan Sari sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.

b. Tujuan Umum dan Khusus

1) Tujuan Umum

Tujuan dari pelaksanaan program yang dirancang oleh praktikan adalah untuk menciptakan anak-anak terlantar yang tangguh akan bencana sehingga mengurangi korban dan kerugian yang timbul akibat bencana.

2) Tujuan Khusus

Secara lebih spesifik tujuan dari adanya program ini antara lain:

- a) Meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana untuk anak-anak terlantar
- b) Memberikan akses informasi kepada anak terlantar mengenai kebencanaan dengan menambahkan materi ke kurikulum sekolah minggu
- c) Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap ancaman bencana

c. Bentuk kegiatan dan Program

Dalam upaya penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kelurahan Babakan Sari, disini praktikan merencanakan suatu program yaitu **“Anak Tangguh Bencana (ANTANA)”**

Bentuk kegiatan dari program ini sendiri yaitu

- 1) Edukasi mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana untuk anak terlantar
- 2) Advokasi sosial untuk menambahkan materi kebencanaan di kurikulum sekolah minggu

d. Sistem Partisipan

Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program yaitu antara lain:

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	<i>Inisiator System</i> (pemrakarsa/ yang memiliki ide untuk membuat suatu program)	Pekerja Sosial
2.	<i>Change Agent System</i> (orang atau lembaga yang mengkoordinasikan usaha perubahan)	a. Pekerja Sosial b. Pengurus wilayah setempat c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat
3.	<i>Client System</i> (orang/lembaga yang menerima perubahan perilaku/menerima tujuan program)	Anak terlantar di Kelurahan Babakan Sari
4.	<i>Support System</i> (orang/lembaga yang membantu terlaksananya program)	a. Pengurus wilayah setempat b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat c. Karang Taruna d. LINMAS
5.	<i>Controlling System</i> (orang/lembaga yang mengontrol dan mengawasi jalannya program)	a. Pengurus wilayah setempat b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat
6.	<i>Implementing System I</i> (orang/lembaga yang melaksanakan program)	a. Pekerja Sosial b. Pengurus wilayah setempat c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat d. Karang Taruna e. LINMAS f. Ibu/Bapak asuh dari anak terlantar g. Anak terlantar di Kelurahan Babakan Sari
7.	<i>Target System</i> (orang/lembaga yang menjadi sasaran program)	Anak terlantar di Kelurahan Babakan Sari
8.	<i>Action System</i> (orang/ lembaga yang bersama pekerja sosial berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas dan mencapai tujuan usaha perubahan)	a. Pengurus wilayah setempat b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat c. Karang Taruna d. LINMAS

e. Metode dan Teknik

1) Metode

Metode yang digunakan untuk mengatasi masalah banyaknya warga yang menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan di Kelurahan Babakan Sari yaitu dengan menggunakan metode Community Organization dan Community Development (CO/CD). Pemilihan metode CO/CD dilakukan karena target sarannya adalah organisasi sosial yang melakukan pelayanan dalam setting masyarakat di tingkat kelurahan.

Model yang diterapkan dalam intervensi CO/CD yang dipilih ialah *locality development* dan *social action*. *Locality development* merupakan model pengembangan masyarakat dengan partisipasi aktif berbagai lapisan masyarakat melalui prosedur demokratis, permufakatan, kerja sama dan *local resources*. Model *social action* menyatakan bahwa dalam masyarakat selalu terdapat kelompok yang tertindas, sehingga model ini bekerja lebih terarah kepada kelompok tertindas dengan menggalang kekuatan dari masyarakat untuk mengadakan pembelaan atau advokasi.

2) Teknik

Adapun teknik yang digunakan yaitu:

a) Penyuluhan sosial

Penyuluhan sosial merupakan seperangkat proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi kepada kelompok sasaran, sehingga muncul pemahaman yang satu visi, perolehan pengetahuan, dan keinginan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

b) Advokasi sosial

Melakukan advokasi sosial kepada warga yang benar-benar dalam kondisi tidak mampu agar dapat berubah kepesertaan BPJS Kesehatan dari mandiri ke JKN-PBI agar mereka dapat tetap mendapatkan jaminan kesehatan.

f. Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

1) Rencana Anggaran Biaya

Tabel 2.21. Sistem Partisipan Profil Penanggulangan Bencana

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan					
1.	ATK	1	Paket	150.000	150.000
2.	Spanduk	1	Buah	75.000	75.000
3.	Snack Narasumber	2	Dus	20.000	40.000
4.	Snack Panitia	15	Dus	15.000	225.000
5.	Snack Peserta	30	Dus	10.000	300.000
Sub Total Bahan					790.000
Honorarium					
1.	Narasumber (Pengajar/Widyaiswara)	2	OJ	500.000	1.000.000
Sub Total Honorarium					1.000.000
Transportasi					
1.	Transportasi Narasumber	2	OK	150.000	300.000
2.	Transportasi Panitia	15	OK	50.000	750.000
Sub Total Transportasi					1.050.000
TOTAL					2.840.000

2) Alat yang dibutuhkan

Tabel 2.23. Alat yang Dibutuhkan Profil Penanggulangan Bencana

No	Daftar Alat Yang Dibutuhkan	Jumlah
1.	Speaker	3 buah
2.	Mikrofon	3 buah
3.	Meja Besar	1 buah
4.	Meja Sedang	3 buah
5.	Spanduk	2 buah
6.	Kursi	30 buah
7.	LCD	1 buah
8.	Proyektor	1 buah
9.	Terminal/Kabel Roll	5 buah
10.	Laptop	1 buah

g. Analisis Kelayakan Program

Tabel 2.24. Analisis Kelayakan Program Penanggulangan Bencana

EKSTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
		<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan serta memberikan inovasi baru di Kelurahan Babakan Sari Antusiasme dari anak-anak yang tinggi
PELUANG (O)	STRATEGI SO:	STRATEGI WO:
<ol style="list-style-type: none"> Keterbukaan pihak sekolah minggu terhadap perubahan Dukungan penuh dari para <i>stakeholder</i> Sarana dan prasarana yang dibutuhkan tersedia di Kantor Kelurahan Babakan Sari 	<ol style="list-style-type: none"> Bersinergi bersama semua pihak untuk mencapai tujuan program yang bermanfaat. Melibatkan anak-anak agar ikut berpartisipasi aktif dalam jalannya program di setiap kegiatan. 	<ol style="list-style-type: none"> Mengemas materi dengan menarik namun tetap mudah dipahami oleh anak-anak terlantar. Merumuskan bersama dengan pihak sekolah minggu mengenai metode penyampaian yang efektif untuk anak-anak terlantar.
ANCAMAN (T)	STRATEGI ST:	STRATEGI WT:
<ol style="list-style-type: none"> Narasumber berhalangan hadir Anak-anak sering kali bersikap yang membuat situasi tidak kondusif 	<ol style="list-style-type: none"> Menjadwalkan ulang pertemuan dengan memberikan pengertian kepada audiens Memberikan penjelasan kepada narasumber bahwa anak-anak sangat antusias sehingga jika berhalangan telah menyiapkan <i>backup</i> narasumber. 	<ol style="list-style-type: none"> Menyiapkan tim keamanan yang bertugas menertibkan anak-anak agar tetap dalam situasi yang kondusif. Kegiatan diselingi dengan <i>ice breaking/games</i> yang berhubungan dengan materi kebencanaan

Melihat hasil analisis kelayakan dari program yang akan dijalankan oleh praktikan menggunakan analisis SWOT dapat diketahui bahwa program ini memiliki kekuatan yang lebih banyak dari kelemahan serta peluang yang lebih besar dibandingkan dengan ancaman yang ada. Hal ini membuktikan bahwa program yang direncanakan layak untuk direalisasikan di Kelurahan Babakan Sari dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penanggulangan bencana.

Kemudian untuk mengukur berhasil atau tidaknya program yang akan dijalankan, disini praktikan menggunakan beberapa indikator keberhasilan yaitu antara lain sebagai berikut:

- 1) Indikator Proses
 - a) Peserta menyimak dengan seksama ketika sosialisasi.
 - b) Peserta aktif selama program berlangsung.
 - c) Semua rangkaian program yang dijalankan diikuti oleh peserta hingga selesai.
 - d) Peningkatan pengetahuan dari target sasaran setelah diberikan penyuluhan.
 - e) Kemudahan akses informasi mengenai kebencanaan untuk anak-anak terlantar
- 2) Indikator Hasil
 - a) Bertambahnya wawasan target sasaran mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana
 - b) Masuknya materi kebencanaan dalam kurikulum sekolah minggu
 - c) Terciptanya kesadaran dan kewaspadaan terhadap ancaman bencana dari target sasaran

h. Jadwal dan Langkah-langkah Program

1) Jadwal Kegiatan

Tabel 2.25. Jadwal Kegiatan Program Penanggulangan Bencana

No	Waktu	Uraian Kegiatan	Partisipan	Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan
1.	06.30-07.30	Pengecekan perlengkapan yang akan digunakan	Seluruh Panitia	Divisi Logistik	Telah melaksanakan pengecekan sebelum acara dimulai
2.	07.30-07.45	Briefing Panitia	Seluruh Panitia	Ketua Pelaksana	Telah berkoordinasi sebelum acara dimulai
3.	07.45-08.00	Peserta mengisi absensi kehadiran	Peserta Kegiatan	Sekretaris	Semua audiens yang hadir telah didata melalui absensi
4.	08.00-08.15	<i>Pre- test</i>	Peserta kegiatan	Sekretaris	Mengetahui seberapa jauh pengetahuan anak terlantar dan ibu/bapak asuh tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana
5.	08.15-08.30	Pembukaan	a. Pengurus wilayah setempat b. Ketua Pelaksana	Divisi Acara	Dimulainya pelaksanaan program kegiatan
6.	SESI I 08.30-09.30	Penyampaian materi oleh narasumber dan Advokasi Sosial	Peserta Kegiatan	a. Divisi Acara b. Divisi Dokumentasi	Audiens mampu memahami tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana dan anak terlantar mendapatkan haknya untuk belajar kebencanaan di sekolah minggu
	SESI II 09.30-10.30				
7.	10.30-10.45	<i>Post-test</i>	Peserta Kegiatan	Divisi Acara	Mengetahui seberapa pemahaman masyarakat terhadap materi yang disampaikan narasumber
8.	10.45-11.00	Penutupan	MC/Moderator	Divisi Acara	Seluruh rangkaian kegiatan terlaksana

1) Langkah-langkah Pelaksanaan Kegiatan

Langkah-langkah pelaksanaan program yang akan dijalankan penulis adalah sebagai berikut:

a) Tahap Persiapan

- (1) Membentuk kepanitiaan program
- (2) Membagi dan menjelaskan tugas pokok setiap divisi.

b) Tahap Perencanaan

- (1) Mengajukan usul mengenai rencana program yang akan dijalankan terhadap pengurus setempat yang berwenang sekaligus mengurus perizinan program dan tempat yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelangsungan program.
- (3) Memperkenalkan kegiatan dengan cara mengadakan sosialisasi singkat kepada ibu/bapak asuh anak terlantar.
- (4) Melakukan penginputan data yang akan mengikuti kegiatan.

c) Tahap Pelaksanaan

Acara dilakukan selama satu hari dengan pembagian dua sesi. Dimana sesi pertama untuk peningkatan pengetahuan mengenai urgensi dari upaya pencegahan bencana untuk anak terlantar dan tahap kedua untuk kegiatan advokasi sosial untuk menambahkan materi kebencanaan dalam kurikulum sekolah minggu. Dalam melaksanakan program, diadakan *games* di sela-sela kegiatan agar partisipan terhindar dari kebosanan. Pemberian hadiah untuk pemenang games di akhir kegiatan sebagai bentuk apresiasi karena telah mengikuti kegiatan dengan *excited*.

d) Tahap Pengakhiran

- (1) Penutupan program oleh pengurus wilayah setempat dan Ketua Pelaksana Program.
- (2) Pengisian kuisioner kesan dan pesan dari peserta untuk program yang dijalankan.
- (3) Mengevaluasi program kegiatan

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Analisis Jaminan Sosial

Jaminan kesehatan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Berdasarkan hasil asesmen ditemukan bahwa ada 2000 peserta yang menunggak pembayaran pada bulan April tahun 2023. Permasalahan menunggaknya pembayaran iuran BPJS Kesehatan ini menyebabkan jalannya program JKN di Kelurahan Babakan Sari menjadi terhambat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka praktikan merencanakan program Edukasi mengenai hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan serta Advokasi Sosial bagi masyarakat yang masuk pada golongan tidak mampu, dimana diharapkan program ini dapat membantu menangani permasalahan yang berfokus pada banyaknya peserta BPJS yang menunggak pembayaran iuran di Kelurahan Babakan Sari. Program dirancang dengan memanfaatkan potensi dan sumber yang tersedia di Kelurahan Babakan Sari sehingga kebutuhan terkait informasi dan akses pelayanan dapat terpenuhi.

2. Analisis Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

Program Keluarga Harapan di Indonesia dicanangkan untuk membantu penduduk miskin klaster terbawah berupa bantuan bersyarat. PKH memiliki manfaat yakni memberikan *income effect* kepada RTSM melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Terkait dengan penyaluran dana bantuan sosial PKH, berdasarkan hasil asesmen dan observasi di lapangan dapat diidentifikasi bahwa sebagian KPM terkendala dalam hal penggunaan kartu ketika pencairan. Hal ini tentu membuat penyaluran dana bantuan menjadi terhambat dan menimbulkan masalah-masalah baru yang lebih serius dan berdampak langsung pada kehidupan KPM. Melihat dari fokus masalah yang diangkat oleh praktikan, maka dari itu diperlukan adanya program yang memberikan edukasi kepada KPM PKH. Masalah ini menjadi sangat penting untuk diselesaikan mengingat tujuan dari adanya PKH adalah untuk membuat KPM menjadi keluarga yang tangguh dan mandiri. Jika kapasitas KPM untuk memahami penggunaan kartu meningkat, berakibat pada penyaluran dana bantuan sosial yang akan berjalan dengan optimal karena kebermanfaatannya bisa langsung dirasakan.

3. Analisis Pemberdayaan Sosial

Pemahaman masyarakat mengenai pemilahan sampah masih sangat kurang. Dengan tidak adanya pemahaman tersebut, kebiasaan untuk memilah sampah pun tidak terbentuk di kalangan masyarakat. Perlu adanya pemahaman yang dilakukan sejak dini dengan diiringi tindak nyata yang dilakukan secara terus menerus. Berdasarkan prioritas masalah yang

dipilih, praktikan merancang suatu program pemberdayaan bagi warga masyarakat di Kelurahan Babakan Sari. Mengingat bahwa permasalahan ini sangat penting dan perlu segera diselesaikan karena menyangkut keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.

4. Analis Penataan Lingkungan Sosial

Pada kenyataan di kehidupan manusia saat ini, antara pemeliharaan lingkungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia terjadi ketimpangan, sehingga timbul berbagai masalah yang bersangkutan dengan penataan lingkungan sosial. Contoh nyatanya adalah permasalahan mengenai pengelolaan sampah yang ada di masyarakat. Berdasarkan hasil asesmen dan observasi di lapangan, dapat diidentifikasi permasalahan terkait penataan lingkungan yaitu ditemukannya timbunan sampah di beberapa tempat. Hal ini jika tidak segera ditangani dapat menimbulkan masalah-masalah yang lebih serius yang menyangkut pada kehidupan manusia. Melihat dari fokus masalah yang diangkat oleh praktikan, maka diperlukan adanya program yang memberikan edukasi kepada warga masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Jika pengetahuan dan keterampilan warga masyarakat meningkat maka akan mengurangi populasi sampah yang ada di jalan atau sekitar rumah penduduk. Dengan demikian maka akan tercipta lingkungan yang bersih, sehat, rapi, dan indah.

5. Analis Penanggulangan Bencana

Kesiapsiagaan merupakan salah satu bagian dari proses manajemen bencana dan didalam konsep bencana, pentingnya kesiapsiagaan merupakan salah satu elemen penting dari kegiatan pencegahan, pengurangan risiko bencana yang bersifat pro-aktif, sebelum terjadinya suatu bencana. Dapat diidentifikasi permasalahan terkait penanggulangan bencana di Kelurahan Babakan Sari, yaitu mengenai tingkat kerentanan anak terlantar yang tinggi dalam menghadapi bencana. Faktor pemicunya sendiri adalah karena mereka terbatas akses informasi dan sedikit pihak yang memberikan perhatian kepada mereka. Melihat dari fokus permasalahan yang menjadi prioritas, maka diperlukan adanya suatu program yang meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kesiapsiagaan khususnya anak-anak terlantar yang kurang mendapatkan perhatian. Dalam program ini nantinya juga akan ada upaya advokasi penambahan materi kebencanaan ke dalam kurikulum sekolah minggu. Dengan demikian maka akan tercipta anak-anak yang tangguh dalam menghadapi bencana.

B. Rekomendasi

1. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

- a. Diharapkan kedepannya Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial lebih memperhatikan lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas dimana mengharuskan adanya *hard copy* laporan praktikum laboratorium.
- b. Diharapkan kedepannya Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial lebih menjaga koordinasi antara dosen program studi dengan dosen pembimbing terkait pelaksanaan praktikum hingga penyusunan laporan.

2. Politeknik Kesejahteraan Sosial

- a. Diharapkan kedepannya Politeknik Kesejahteraan Sosial dapat memberikan surat perizinan tepat waktu atau jauh hari sebelum praktikum dimulai untuk memudahkan praktikan dalam mencari data primer maupun sekunder.
- b. Diharapkan kedepannya Politeknik Kesejahteraan Sosial dapat memberikan bantuan akomodasi transportasi kepada praktikan dalam kegiatan Praktikum Laboratorium

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bintarto. Dan Surastopo. (1979). "Metode Analisa Geografi". Jakarta : LP3ES.
- Campbell, B. (1983). "Human Ecology". London: Heineman Educational Book LTD
- Gelbert M, Prihanto D, dan Suprihatin A. (1996). "Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart" ". Malang: Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, PPPGT/VEDC
- Suharto, Edi. (2010). "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial". Bandung: Refika Aditama

Jurnal:

- Darmayanti, L.D. dan Raharjo, B.B. (2020). "*Keikutsertaan Masyarakat dalam Jaminan Kesehatan Nasional Mandiri*". Jurnal HIGEIA, 04(04), 824-834. Diunduh dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/view/38011/18003> . Diakses pada 19 April 2023 pukul 21.34 WIB
- Dobiki, Joflius. (2018). "*Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara di Kabupaten Halmahera Utara*". Jurnal Spasial, 05(02), 220-228. Diunduh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/download/20803/20494> . Diakses pada 26 April 2023 pukul 00.31 WIB
- Ferianto, Kusno. (2019). "*Efektifitas Pelatihan Penanggulangan Bencana Dengan Metode Simulasi Terhadap Perilaku Kesiapsiagaan Bencana Banjir Pada Siswa Sman 2 Tuban*". Mesencephalon: Jurnal Kesehatan, 05(02), 88-94. Diunduh dari <https://ejournal.stikeskepanjen-pemkabmalang.ac.id/index.php/mesencephalon/article/view/110/59> . Diakses pada 27 April 2023 pukul 12.28 WIB
- Habibullah, H. (2017). "*Perlindungan Sosial Komprehensif di Indonesia*". Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 03(01), 1-18. Diunduh dari <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/492/458>. Diakses pada 7 April 2023 pukul 13.21 WIB
- Hardiatmi, Sri. (2011). "*Pendukung Keberhasilan Pengelolaan Sampah Kota*". INNOFARM: Jurnal Inovasi Pertanian, 10(01), 50-66. Diunduh dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=114958&val=5262&title=PENDUKUNG%20KEBERHASILAN%20PENGELOLAAN%20SAMPAH%20KOTA>. Diakses pada 30 Maret 2023 pukul 15.22 WIB
- Kurniati, E., dkk. (2019). "*Implementasi Program Anak Peduli Lingkungan Melalui Kegiatan Memilah Sampah*". Jurnal Pendidikan, 03(01). Diunduh dari <http://www.journal.umtas.ac.id/index.php/EARLYCHILDHOOD/article/view/433/470> . Diakses pada 24 April 2023 pukul 21.37 WIB

- Latifah, N., Nabila, F., dan Fajrini, F. (2020). "*Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Peserta Mandiri Membayar Iuran BPJS di Kelurahan Benda Baru*". *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*. 16(02), 84-92. Diunduh dari <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK/article/view/5528/3891> . Diakses pada 8 April 2023 pukul 13.50 WIB
- Mariyam, Siti. (2018). "*Sistem Jaminan Sosial Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Perspektif Hukum Asuransi)*". *Serat Acitya: Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 07(02), 36-42. Diunduh dari <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/886/771> . Diakses pada 7 April 2023 pukul 20.58 WIB
- Maryuni, S., Pardi, dan Eka, A. (2019). "*Strategi Implementasi Program Perluasan Kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat*". *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 01(02). Diunduh dari <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpp/article/view/2443/2011>. Diakses pada 7 April 2023 pukul 12.43 WIB
- Monice, dan Perinov. (2016). "*Analisis Potensi Sampah Sebagai Bahan Baku Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (Pltsa) Di Pekanbaru*" . *Jurnal Sain, Energi, Teknologi, dan Industri*, 01(01), 9-16. Diunduh dari <https://repository.unilak.ac.id/377/1/166-Other-350-1-10-20180215.pdf>. Diakses pada 25 April 2023 pukul 23.27 WIB
- Pertiwi, A.A., dkk. (2016). "*Perancangan Buku Interaktif Pentingnya Memilah Sampah Dalam Upaya Membentuk Kebiasaan Memilah Sampah Untuk Anak-Anak*". *e-Proceeding of Art & Design*, 03(03), 789-796. Diunduh dari <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/artdesign/article/view/4387/4119> . Diakses pada 24 April 2023 pukul 19.52 WIB
- Saragi, S., Maria U.B., Nur A.A. (2021). "*Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kota Rantang Kecamatan Hampan Perak*" . *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Pelayanan Publik*, 08(01). Diunduh dari <https://stia-binataruna.e-journal.id/PUBLIK/article/view/150/125> . Diakses pada 24 April 2023 pukul 2.23 WIB
- Sekarningrum, B., Suprayogi Y., dan Yunita D. (2020). "*Sosialisasi Dan Edukasi Kangpisan (Kurangi, Pisahkan Dan Memanfaatkan Sampah)*". *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 03(01), 73-86. Diunduh dari <https://scholar.archive.org/work/4vcglgyg5ngsxn7nmtsxro7m2y/access/wayback/http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/article/download/25244/pdf> . Diakses pada 30 Maret 2023 pukul 15.20 WIB
- Sujarta, P., dan Simonapendi, M.L. (2021). "*Pelatihan Pengolahan Sampah Organik Dengan Konsep Eco-Enzym*". *Jurnal Pengabdian Papua*, 05(01), 34-39. Diunduh dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2955039&val=26306&title=PELATIHAN%20PENGOLAHAN%20SAMPAH%20ORGANIK%20DENGAN%20KONSEP%20ECO-ENZYM> . Diakses pada 25 April 2023 pukul 17.10 WIB
- Suprianto, A., dan Mutiarin, D. (2017). "*Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional: Studi Tentang Hubungan Stakeholder, Model*

- Pembiayaan dan Outcome JKN di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*". Journal of Governance And Public Policy, 04(01), 71-107. Diunduh dari <https://mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/09/EVALUASI-PELAKSANAAN-JAMINAN-KESEHATAN-NASIONAL-Studi-Tentang-Hubungan-Stakeholder-Model-Pembiayaan-dan-Outcome-JKN-di-Kabupaten-Bantul-Provinsi-Daerah-Istimewa-Yogyakarta.pdf> . Diakses pada 7 April 2023 pukul 2.19 WIB
- Sutjiatmi, Sri, dan Umaroh, Farida. (2019). *"Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal"* . Indonesian Governance Journal (Kajian Politik-Pemerintahan), 02(02). Diunduh dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1480649&val=17798&title=Efektivitas%20Program%20Keluarga%20Harapan%20PKH%20dalam%20meningkatkan%20Kesejahteraan%20Masyarakat%20di%20Desa%20Kupu%20Kecamatan%20Dukuhturi%20Kabupaten%20Tegal> . Diakses pada 24 April pukul 00.52 WIB
- Vidyastuti, V.L., Halimah, M., dan Hilman A.H. (2022). *"Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung"*. Jurnal Administrasi Negara, 14(01), 426-431. Diunduh dari <http://journal.unpad.ac.id/jane/article/view/41340/18123> . Diakses pada 21 April 2023 pukul 15.34 WIB
- Yuanita, P., dan Keban, Y.T. (2020). *"Evaluasi Efektivitas Program Kang Pisman di Kelurahan Sukaluyu dan Faktor yang Mempengaruhinya"*. Rekayasa Hijau:Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan, 04(02), 93-108. Diunduh dari <https://ejurnal.itenas.ac.id/index.php/rekayasahijau/article/view/3905/2364> . Diakses pada 30 Maret 2023 pukul 20.19 WIB
- Yudistirani, S.A., Syaufina, L., dan Sri, M. (2015). *"Desain Sistem Pengelolaan Sampah Melalui Pemilahan Sampah Organik Dan Anorganik Berdasarkan Persepsi Ibu - Ibu Rumah Tangga"* . Jurnal Konversi, 04(02), 29-42. Diunduh dari <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/konversi/article/view/894/818> . Diakses pada 24 April 2023 pukul 20.21 WIB

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan






Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan





Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan


LAMPIRAN

No	Keterangan	Dokumentasi
1.	Serah terima pratikan oleh pihak Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung.	
2.	Wawancara dengan pengelola TPST, Kelurahan Babakan Sari.	
3.	Wawancara dengan Ketua RW dan Ketua PKK di RW 13	

4.	Pemilihan ketua LPM, Kelurahan Babakan Sari	
5.	Supervisi oleh dosen pembimbing di Kelurahan Babakan Sari	
6.	Wawancara serta partisipasi dalam kegiatan POSYANDU di RW 09.	
7.	Wawancara bersama PKH di RW 12	
8.	Supervisi oleh dosen pembimbing di Kelurahan Babakan Sari.	

<p>9.</p>	<p>Wawancara bersama Kader PKK RW 07 mengenai BPJS Kesehatan.</p>	 <p>Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia Gang Mirsal, Kiaracondong, Kota Bandung, 40283, Jawa Barat, Indonesia Lat: -6.923059, Long: 107.646382 03/10/2023 05:29 PM GMT+07:00 Note - Captured by GPS Map Camera</p>
<p>10.</p>	<p>Wawancara bersama ketua RW 07 mengenai jaminan sosial.</p>	 <p>Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia Gang Askon, Kiaracondong, Kota Bandung, 40283, Jawa Barat, Indonesia Lat: -6.923355, Long: 107.648919 03/16/2023 11:13 AM GMT+07:00 Note - Captured by GPS Map Camera</p>
<p>11.</p>	<p>Wawancara bersama bendahara rukun kematian RW 10.</p>	 <p>Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia Jalan Garu VIII, Kiaracondong, Kota Bandung, 40283, Jawa Barat, Indonesia Lat: -6.919986, Long: 107.648664 03/17/2023 03:07 PM GMT+07:00 Note - Captured by GPS Map Camera</p>
<p>12.</p>	<p>Kegiatan POSBINDU di RW 09.</p>	

13.	Gambaran kondisi jalan di RW 17 yang terdapat timbunan sampah.	
14.	Wawancara bersama PKH di RW 12	
15.	Wawancara bersama PKH di RW 10	
16.	Proses berlangsungnya Lokal karya di Kelurahan Babakan Sari.	
17.	Serah terima pratikan dari pihak Kelurahan Babakan Sari ke dosen pembimbing.	

<p>18. Wawancara bersama ketua PKK RW 17.</p>		
<p>19. Gambaran atau kondisi kali yang tercemar oleh sampah di RW 17.</p>		